

**PERLAKUAN AKUNTANSI ATAS AKTIVA TETAP TERHADAP
KUALITAS LAPORAN KEUANGAN**

**(Studi Kasus Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota
Bandung)**

SKRIPSI

Ditujukan untuk memenuhi salah satu syarat Ujian Sarjana Ekonomi
Program Studi S1 Akuntansi

ACEP TAUFIQ EPENDI

NPM : C10150170



**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) EKUITAS
BANDUNG
2019**

**PERLAKUAN AKUNTANSI ATAS AKTIVA TETAP TERHADAP
KUALITAS LAPORAN KEUANGAN
(Studi Kasus Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota
Bandung)**

ACEP TAUFIQ EPENDI

NPM : C10150170

Bandung, 27 Februari 2019

Pembimbing

(Aneu Kuraesin, SE., M.Si)

Mengetahui,

Ketua STIE EKUITAS

Ketua Program Studi
S1 Akuntansi

(Dr.rer.nat. M. Fani Cahyandito, SE., M.Sc., CSP)

(Dwi Puryati, SE., M.Si., Ak., CA)

Tanggung jawab yuridis ada pada penulis

PERNYATAAN

PROGRAM SARJANA

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Sarjana, baik di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) EKUITAS maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing dan penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang sudah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi ini.

Bandung, 27 Februari 2019

Yang membuat pernyataan,

(Acep Taufiq Ependi)

Perlakuan Akuntansi Atas Aktiva Tetap Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

(Studi Kasus Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung)

Oleh :

Acep Taufiq Ependi

Di bawah bimbingan :

Aneu Kuraesin, SE., M.Si

ABSTRAK

Dalam laporan keuangan pemerintah daerah terdapat aset tetap yang harus dikelola dengan sangat baik agar menghasilkan keuangan yang baik pula. Sampai saat ini pengelolaan aset di kota Bandung yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan belum maksimal terutama terkait aset tetap. Dampaknya pada kualitas laporan keuangan yang masih mendapat hasil opini audit Wajar Dengan Pengecualian. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui perlakuan akuntansi atas aktiva tetap terhadap kualitas laporan keuangan.

Penelitian ini dilakukan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung. Responden dalam penelitian ini adalah pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung dengan mengambil sampel dari bidang akuntansi dan bidang pencatatan dan pelaporan aset. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode deskriptif dan verifikatif teknik pengumpulan data melalui *survey* menggunakan kuesioner dan kepustakaan.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan akuntansi atas aktiva tetap mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung. Nilai koefisien determinasi sebesar 59% menunjukkan bahwa perlakuan akuntansi atas aktiva tetap berpengaruh sebesar 59% terhadap kualitas laporan keuangan.

Kata Kunci : Akuntansi Aktiva Tetap, Standar Akuntansi Pemerintahan, Kualitas Laporan Keuangan.

Accounting Treatment for Fixed Assets Against the Quality of Financial Statements

(Case Study at the Regional Financial and Asset Management Agency in the City of Bandung)

By :

Acep Taufiq Ependi

Under the guidance of :

Aneu Kuraesin, SE., M.Si

ABSTRACT

In the financial statements of local governments there are fixed assets that must be managed very well in order to produce good finance as well. Until now, asset management in the city of Bandung that is in accordance with government accounting standards has not been maximized, especially related to fixed assets. The impact on the quality of financial statements that still gets the results of a reasonable audit opinion with exceptions. The purpose of this study is to determine the accounting treatment of fixed assets for the quality of financial statements.

This research was conducted at the Regional Financial and Asset Management Agency in Bandung City. Respondents in this study were employees of the Regional Financial and Asset Management Agency of the City of Bandung by taking samples from the fields of accounting and asset recording and reporting. The research method used is descriptive method and verification of data collection techniques through surveys using questionnaires and literature.

Based on the results of the study indicate that the accounting treatment of fixed assets has a significant effect on the quality of financial statements at the Regional Financial and Asset Management Agency in the City of Bandung. The coefficient of determination of 59% indicates that the accounting treatment of fixed assets has an effect of 59% on the quality of financial statements.

Keywords: Fixed Asset Accounting, Government Accounting Standards, Quality of Financial Statements.

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji dan Syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya. Tak lupa shalawat beserta salam penulis curahkan kepada junjungan kita semua Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat sampai kita selaku umat-Nya sehingga penulis dapat merampungkan skripsi yang berjudul “Perlakuan Akuntansi Atas Aktiva Tetap Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Studi Kasus Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bandung”. Penulisan skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi serta dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Strata Satu pada Program Studi Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) EKUITAS Bandung.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa penulis tidak lepas dari pihak yang telah memberikan bimbingan dan dukungan sebagai bahan masukan untuk penulis. Ungkapan terimakasih yang tak pernah putus penulis ungkapkan untuk semua pihak, diantaranya:

1. Dr.rer.nat. Martha Fani Cahyandito, SE., M.Sc., CSP selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Ekuitas dan selaku PLT Wakil Ketua 1 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Ekuitas.
2. Ibu Dwi Puryati, SE., M.Si., Ak., CA selaku Ketua Program Studi S1 Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) EKUITAS Bandung.
3. Bapak Ade Imam Muslim, S.Pd., S.Akt., M.Si selaku Dosen Wali yang selalu memberikan arahan dan masukan selama penulis menjadi mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) EKUITAS Bandung.

4. Ibu Aneu Kuraesin, SE., M.Si selaku pembimbing selama penulis menyusun Laporan Skripsi di STIE EKUITAS Bandung.
5. Dengan rasa hormat yang tulus dan ucapan terima kasih kepada Bapak/Ibu Dosen, staf BAAK, staf BAU, dan seluruh pegawai STIE EKUITAS Bandung.
6. Dengan rasa hormat yang tulus dan ucapan terimakasih yang tiada terhingga kepada kedua Orang Tua, Bapak Endang Wardiat S.Pd dan Ibu Tuti Kusmayati S.Pd, serta saudara Fadhil Febrian Ependi yang selalu memberikan do'a, semangat, serta dukungan moral dan moril dalam penyusunan Laporan Skripsi ini.
7. Bapak Idad Irawan Hamzah, SE., M.Si selaku Kepala Sub Bidang Inventarisasi Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bandung yang telah membantu dan memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian *survey* di BPKA Kota Bandung.
8. Teman-teman seperjuangan di Bandung Ananda Cherry Pratama, Cepi Rizki Bagus Satria, Gingin Sukma Ginanjar, Mardiansyah, Yoga Pratama yang membantu mengajarkan dan memberikan semangat kepada penulis untuk merampungkan penyusunan laporan skripsi.
9. Sahabat dan teman-teman spesial di kampung halaman Lesmana Iman Nadi, Adi Tri Sampoerno, Jaenal Arifin, yang telah memberikan semangat kepada penulis untuk merampungkan penulisan skripsi ini.
10. Semua pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu per satu yang telah memberikan bantuan serta dukungan kepada Penulis.

Penulis menyadari bahwa penyusunan Laporan Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, karena keterbatasan kemampuan, pengetahuan, dan pengalaman Penulis, oleh karena itu Penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun sebagai perbaikan dimasa yang akan datang. Penulis juga berharap semoga kelak Laporan Skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan dapat dijadikan pertimbangan bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Bandung, 27 Februari 2019

Penulis

Acep Taufiq Ependi

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL DAN GAMBAR.....	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian	6
1.4 Kegunaan Penelitian	7
1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian	8

BAB II KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN

HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka.....	9
2.1.1 Akuntansi	9
2.1.1.1 Definisi Akuntansi	9
2.1.1.2 Tujuan Akuntansi	10
2.1.1.3 Fungsi Akuntansi	11

2.1.2	Laporan Keuangan	12
2.1.2.1	Definisi Laporan Keuangan	12
2.1.2.2	Tujuan Laporan Keuangan	17
2.1.2.3	Pengguna Laporan Keuangan	18
2.1.2.4	Karakteristik Laporan Keuangan	20
2.1.3	Aset Tetap	25
2.1.3.1	Definisi Aset Tetap	25
2.1.3.2	Klasifikasi Aset Tetap	26
2.1.3.3	Pengakuan Aset Tetap.....	27
2.1.3.4	Pengukuran Aset Tetap	29
2.1.3.5	Penilaian Awal Aset Tetap.....	29
2.1.3.6	Pengeluaran Setelah Perolehan	33
2.1.3.7	Pengukuran Berikutnya Terhadap Pengakuan Awal.....	33
2.1.3.8	Penghentian dan Pelepasan	35
2.1.3.9	Pengungkapan	36
2.1.4	Kualitas Laporan Keuangan	37
2.2	Kerangka Pemikiran	40
2.3	Hipotesis.....	43
BAB III OBJEK DAN METODE PENELITIAN		
3.1	Objek Penelitian	44
3.1.1	Gambaran Umum Perusahaan	44
3.1.1.1	Visi dan Misi Perusahaan.....	44
3.1.1.2	Sejarah Singkat dan Kedudukan	45
3.2	Metode Penelitian.....	45

3.2.1	Metode Yang Digunakan	46
3.2.2	Operasionalisasi Variabel Penelitian.....	47
3.2.3	Populasi dan Teknik Penentuan Sampel	50
3.2.3.1	Populasi.....	50
3.2.3.2	Penentuan Sampel	50
3.2.4	Teknik Pengumpulan Data	51
3.2.5	Rancangan Pengujian Hipotesis	51
3.2.5.1	Analisis Data	52
3.2.5.2	Uji Instrumen Penelitian.....	52
3.2.5.3	Uji Normalitas	55
3.2.5.4	Uji Hipotesis	56
3.2.5.5	Analisis Regresi Linear Sederhana	57
3.2.5.6	Analisis Koefisien Determinasi	58
3.2.5.7	Rancangan Kuesioner	58
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Hasil Praktik Kerja		
4.1	Hasil Pengujian Instrumen Penelitian dan Karakteristik Responden.....	59
4.1.1	Karakteristik Responden	59
4.1.2	Hasil Analisis Data.....	63
4.1.2.1	Variabel Perlakuan Akuntansi atas Aktiva Tetap	64
4.1.2.2	Variabel Kualitas Laporan Keuangan.....	66
4.1.3	Hasil Uji Validitas	68
4.1.4	Hasil Uji Reliabilitas	70
4.1.5	Hasil Transformasi Data Interval Menjadi Ordinal.....	71
4.1.6	Hasil Uji Normalitas.....	72

4.2	Hasil Penelitian	73
4.2.1	Uji Statistik-F	74
4.2.2	Analisis Regresi Linear Sederhana.....	74
4.2.3	Analisis Koefisien Determinasi.....	75
4.3	Pembahasan Hasil Penelitian	76
4.3.1	Perlakuan Akuntansi Atas Aktiva Tetap Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung	76
4.3.2	Kualitas Laporan Keuangan Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung	78
4.3.3	Pengaruh Perlakuan Akuntansi Atas Aktiva Tetap Secara Parsial dan Simultan Berpengaruh Terhadap Kualitas Laporan Keuangan.....	78

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1	Kesimpulan.....	80
5.2	Saran	81

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

Tabel 1.1 Data Aktiva Tetap di Neraca Pemerintah Kota Bandung.....	3
Tabel 1.2 Daftar Opini Audit BPK atas LKPD Kota Bandung.....	16
Tabel 3.1 Operasionalisasi Variabel	48
Tabel 3.2 Tabel <i>Scoring</i> Skala <i>Likert</i>	50
Tabel 4.1 Data Penyebaran Kuesioner	60
Tabel 4.2 Deskripsi Responden berdasarkan Jenis Kelamin	60
Tabel 4.3 Deskripsi Responden berdasarkan Jabatan	61
Tabel 4.4 Deskripsi Responden berdasarkan Pendidikan	61
Tabel 4.5 Deskripsi Responden berdasarkan Lama Bekerja.....	62
Tabel 4.6 Deskripsi Responden berdasarkan Diklat	63
Tabel 4.7 Hasil Statistik Deskriptif Variabel X	64
Tabel 4.8 Hasil Statistik Deskriptif Variabel Y	67
Tabel 4.9 Hasil Uji Validitas Variabel X.....	69
Tabel 4.10 Hasil Uji Validitas Variabel Y	70
Tabel 4.11 Hasil Uji Reliabilitas Variabel X	70
Tabel 4.12 Hasil Uji Reliabilitas Variabel Y	71
Tabel 4.13 Hasil Transformasi data Ordinal menjadi Interval.....	71
Tabel 4.14 Hasil Uji Normalitas	73
Tabel 4.15 Hasil Uji Statistika-F.....	74
Tabel 4.17 Hasil Uji Regresi Linear Sederhana.....	75
Tabel 4.18 Koefisien Determinasi.....	76
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	42

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat Keterangan Bimbingan Skripsi
- Lampiran 2 Surat Keterangan Perubahan Judul
- Lampiran 3 *Photocopy* Kartu Bimbingan
- Lampiran 4 Surat Keterangan Penelitian
- Lampiran 5 Kuesioner Penelitian
- Lampiran 6 *Photocopy* Sertifikat *TOEFL* IEDUC
- Lampiran 7 *Photocopy* sertifikat Brevet Pajak
- Lampiran 8 *Photocopy* sertifikat Uji Kompetensi
- Lampiran 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri No.64 Tahun 2013
- Lampiran 10 Rekap Data Mentah Hasil Kuesioner
- Lampiran 11 Deskriptif Frekuensi Analisis Data
- Lampiran 12 Uji Validitas
- Lampiran 13 Uji Reliabilitas
- Lampiran 14 Uji Normalitas
- Lampiran 15 Uji-F (Simultan)
- Lampiran 16 F-Tabel
- Lampiran 17 Hasil Analisis Regresi Linear Sederhana
- Lampiran 18 Sertifikat Spekta
- Lampiran 19 Lembar Materi Saran/Revisi Hasil Ujian Sidang
- Lampiran 20 Lembar Surat Keterangan Revisi
- Lampiran 21 Lembar Persetujuan Perbaikan {Revisi} Skripsi
- Lampiran 22 Riwayat Hidup (CV)

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan tata kelola keuangan yang baik, setiap perusahaan baik sektor pemerintahan maupun sektor swasta terus melakukan upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangannya. Disamping itu, ada juga jenis perusahaan yang memang dalam kegiatan usahanya lebih memprioritaskan pelayanan secara maksimal kepada masyarakat. Jenis organisasi tersebut dikenal dengan organisasi nirlaba (non profit) dan badan atau instansi pemerintah (Halim, 2008: 110-111).

Laporan keuangan menurut Ikatan Akuntansi Indonesia dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 2015 No. 1 paragraf 20), menyatakan bahwa laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan juga arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi (PSAK No.1 2015:3). Namun demikian, laporan keuangan tidak menyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan pemakai dalam mengambil keputusan ekonomi karena secara umum menggambarkan pengaruh keuangan dan kejadian masa lalu.

Laporan keuangan pemerintah yang dihasilkan harus memenuhi standar akuntansi pemerintah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2005 yang direvisi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang

Standar Akuntansi Pemerintahan, yang kemudian diperbaharui dengan keluarnya Permendagri No 64 Tahun 2013 yang mengharuskan pemerintah daerah untuk menyajikan laporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Berbasis Akrua.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) menjelaskan bahwa SAP Berbasis Akrua adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrua, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD. Laporan keuangan pemerintah harus memenuhi kriteria laporan keuangan yang berkualitas, ditetapkan dalam kerangka konseptual akuntansi pemerintahan PP No. 71 Tahun 2010, yaitu: relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami.

Salah satu aset perusahaan yang memerlukan kebijakan dan pengelolaan yang cermat adalah aktiva tetap. Kebijakan aktiva tetap harus sesuai dengan kondisi perusahaan dan gambaran yang wajar mengenai hasil operasi perusahaan yang akan mempengaruhi kewajaran laporan keuangan perusahaan tersebut secara keseluruhan.

Menurut Suharli (2006: 259) dalam jurnal Analisis Perlakuan Akuntansi atas Aset Tetap Terhadap Laporan Keuangan Berdasarkan SAK ETAP Nomor 15 menyatakan aset tetap adalah harta berwujud (*tangible asset*) yang memiliki masa manfaat ekonomis lebih dari satu tahun bernilai material, dan digunakan untuk kegiatan operasi normal perusahaan dan merupakan pengeluaran yang nilainya besar atau material. Aset tetap berwujud pada dasarnya bisa memberikan gambaran kapitalisasi yang wajar, oleh karena itu dibutuhkan adanya perlakuan

akuntansi yang memadai mulai dari saat perolehan sampai dengan saat pengalokasian biaya selama umur aset tetap berwujud tersebut.

Suatu aset dapat digolongkan dan dicatat sebagai aset tetap sebuah perusahaan apabila aset tersebut memenuhi kriteria: aset dimiliki oleh perusahaan, memiliki wujud yang nyata, dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan operasi perusahaan dan bukan untuk diperjual belikan, dan memiliki masa manfaat lebih dari satu periode.

Tabel 1.1
Data Aktiva Tetap di Neraca Pemerintah Kota Bandung
Tahun 2013-2017

Aset Tetap	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Tanah	15.375.587.131.286,00	15.686.709.665.756,00	15.101.314.957.283,00	15.571.812.877.494,00	14.559.653.382.677,00
Peralatan dan Mesin	825.029.062.298,90	1.078.827.766.814,90	1.460.177.663.088,90	1.803.483.836.942,55	1.883.978.343.106,15
Gedung dan Bangunan	1.692.361.165.386,30	2.523.080.499.949,72	2.659.154.219.075,72	2.932.656.514.634,52	2.733.347.180.695,72
Jalan, Jaringan, dan Instalasi	2.109.914.456.788,89	2.472.679.840.467,89	2.831.840.061.629,89	3.390.726.035.656,89	3.238.006.735.534,90
Aset Tetap Lainnya	63.182.301.948,00	69.505.685.413,00	81.521.065.019,00	148.242.987.196,90	221.647.166.930,88
Konstruksi Dalam Pengerjaan	811.945.942.448,00	169.224.641.112,00	478.186.673.666,00	546.494.072.793,00	450.196.298.912,40
Jumlah	20.878.020.060.156,10	22.000.028.099.513,50	22.612.194.639.762,50	24.393.416.324.717,90	23.086.829.107.857,00

Sumber : BPKAD

Berdasarkan data pada tabel diatas, dapat dilihat bahwa aktiva tetap pada umumnya memiliki nilai yang besar sehingga dapat mempengaruhi posisi kekayaan dalam laporan keuangan. Oleh karena itu penyajiannya memerlukan perlakuan khusus dan perhitungan yang teliti.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) setiap tahunnya mendapat penilaian berupa Opini dari Badan Pengawas Keuangan (BPK). Ketika BPK memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap LKPD, artinya dapat dikatakan bahwa laporan keuangan suatu entitas pemerintah daerah tersebut disajikan dan diungkapkan secara wajar dan berkualitas. Terdapat empat opini yang diberikan pemeriksa yaitu: Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Opini Tidak Wajar (TP), dan Pernyataan Menolak memberi Opini atau Tidak Memberi Pendapat (TMP).

Fenomena kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia masih banyak menyajikan data-data yang tidak sesuai. Selain itu juga masih banyak temuan-temuan audit yang berhasil ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam pelaksanaan audit laporan keuangan pemerintah.

Fenomena yang terjadi menyangkut kualitas laporan keuangan yaitu terjadi di kota Bandung, Kota Bandung menjadi salah satu dari pemerintah daerah yang masih meraih opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), Laporan Hasil Pemeriksaan (LPH) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun anggaran 2017.

Menurut Arman Syifa Kepala BPK perwakilan Jawa Barat, masih terdapat sejumlah temuan permasalahan dan melebihi batas toleransi yang disebut materialitas. Untuk Kota Bandung BPK menemukan adanya beberapa kontrak penyewaan tanah yang tidak jelas pembaharuan kontraknya, sehingga, tidak ada perhitungan akurat mengenai piutang penyewaan tanah tersebut. Temuan lainnya yaitu sekitar Rp 400 miliar aset tetap milik Pemkot Bandung berupa gedung, bangunan dan mesin tidak jelas keberadaannya.

Tabel 1.2
Daftar Opini Audit BPK atas LKPD Kota Bandung Tahun 2013-2017

Tahun	Opini Badan Pemeriksa Keuangan
2013	Wajar Dengan Pengecualian
2014	Wajar Dengan Pengecualian
2015	Wajar Dengan Pengecualian
2016	Wajar Dengan Pengecualian
2017	Wajar Dengan Pengecualian

Tabel 1.2 di atas menunjukkan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini terhadap Kota Bandung pada tahun 2013-2017 dengan opini memberikan Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Permasalahan yang dihadapi kota Bandung setiap tahunnya dari tahun 2013-2017 selalu sama yaitu terkait pengelolaan aset, dimana dikelola oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bandung.

Berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui bahwa pergerakan kualitas informasi laporan keuangan tergantung dari seberapa besar usaha dalam melakukan perbaikan terhadap sistem dan tata kelola. Untuk membuat laporan keuangan yang berkualitas perlu penerapan Akuntansi atas pengelolaan Aset daerah yang harus diperbaiki dan ditingkatkan sesuai dengan Standar Akuntansi yang berlaku umum. Maka penulis tertarik untuk menelaah secara lebih mendalam, diharapkan dapat diketahui sampai sejauh mana pengaruh Akuntansi atas aktiva tetap terhadap kualitas informasi laporan keuangan.

Maka penulis memilih judul penelitian : **“Perlakuan Akuntansi Atas Aktiva Tetap Terhadap Kualitas Laporan Keuangan” (Studi Kasus Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung).**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah penelitian yang telah diuraikan, maka permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Perlakuan Akuntansi atas Aktiva tetap pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung?
2. Bagaimana Kualitas Laporan Keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung?
3. Berapa besar pengaruh Akuntansi Aktiva tetap terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh perlakuan akuntansi atas Aktiva tetap terhadap kualitas informasi laporan keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung. Adapun tujuan yang hendak untuk di capai penulis adalah :

1. Untuk mengetahui Perlakuan Akuntansi atas Aktiva tetap pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui Kualitas Laporan Keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung.
3. Untuk mengetahui pengaruh Aktiva tetap terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung.

1.4 Kegunaan Penelitian

1. Bagi Peneliti

- a. Proses dan hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan peneliti mengenai keilmuan dibidang keuangan, khususnya perlakuan Akuntansi atas aktiva tetap yang dalam hal ini mempengaruhi terhadap kualitas Laporan keuangan.
- b. Dapat memperoleh pengalaman yang berharga guna mempersiapkan diri untuk memasuki dunia kerja.

2. Bagi Instansi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangan pemikiran dan masukan kepada pemerintah daerah berupa saran-saran yang positif mengenai bagaimana peran akuntansi atas pengelolaan barang milik daerah terutama aktiva tetap yang dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan.

3. Bagi Penelitian Selanjutnya

Sebagai referensi atau bahan kajian dalam pemenuhan informasi yang bermanfaat bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian khususnya mengenai perlakuan Akuntansi atas Aktiva tetap terhadap kualitas laporan keuangan.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penyusunan laporan skripsi ini, penulis mengambil lokasi penelitian pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung yang beralamat di Jl. Wastukencana No.02 Bandung, dimulai sejak bulan September Tahun 2018 sampai dengan bulan Januari Tahun 2019.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Akuntansi

2.1.1.1 Definisi Akuntansi

Akuntansi berasal dari kata asing *accounting* yang artinya dalam bahasa Indonesia adalah menghitung atau mempertanggungjawabkan. Akuntansi merupakan suatu proses mencatat, mengklasifikasikan, meringkas, mengelola dan menyajikan data, transaksi serta kejadian yang berhubungan dengan keuangan sehingga dapat digunakan oleh orang yang menggunakannya dengan mudah dimengerti untuk pengambilan suatu keputusan serta tujuan lainnya.

Menurut Kieso et al. (2016:2) pengertian akuntansi adalah :

“Accounting consist of the three basic activities —it identifies, records, and communicates the economft events of an organization to interest users. A company identifies the economic events relevant to its business and then records those events in order to provide a history of financial activities. Recording consists of keeping a systematic, chronological diary of events, measured in dollar and cents. Finally, communicates the collected information to interest user by means accounting reports are called financial statement”.

Dari penjelasan definisi diatas dapat diartikan akuntansi terdiri dari tiga kegiatan yang mendasar yaitu identifikasi, pencatatan, dan pengkomunikasian peristiwa ekonomi suatu organisasi kepada pihak yang berkepentingan. Perusahaan mengidentifikasi peristiwa ekonomi sesuai dengan kegiatan usahanya dan mencatat peristiwa tersebut untuk menyediakan catatan kegiatan keuangan. Pencatatan dilaksanakan secara sistematis, kronologis setiap peristiwa, dalam satuan mata uang. Akhirnya pada pengkomunikasian kumpulan informasi tersebut

kepada pihak yang berkepentingan dalam bentuk laporan akuntansi atau dikenal dengan laporan keuangan.

Menurut Warren (2013:10), akuntansi didefinisikan sebagai:

“Sistem informasi yang menghasilkan laporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan”.

Menurut Sumarsan T. (2013:1) menjelaskan bahwa:

“Akuntansi adalah suatu seni untuk mengumpulkan, mengidentifikasi, mengklasifikasikan, mencatat transaksi serta kejadian yang berhubungan dengan keuangan, sehingga dapat menghasilkan informasi yaitu laporan keuangan yang dapat digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan”.

Kegiatan akuntansi, diantaranya :

1. Pengidentifikasian dan pengukuran data yang relevan untuk suatu pengambilan keputusan.
2. Pemrosesan data yang bersangkutan kemudian pelaporan informasi yang dihasilkan.
3. Pengkomunikasian informasi kepada pemakai laporan.

2.1.1.2 Tujuan Akuntansi

Tujuan utama akuntansi adalah menyajikan informasi ekonomi dari suatu kesatuan ekonomi kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Informasi tersebut dapat berupa laporan keuangan.

Adapun menurut Mulyadi (2016), akuntansi memiliki jenis-jenis dan tujuan. Tujuan akuntansi adalah sebagai berikut:

1. Menyajikan informasi dan fungsi laporan keuangan untuk kegiatan usaha dalam bentuk jenis jenis laporan keuangan.

2. Melengkapi informasi yang dihasilkan oleh sistem yang ada seperti mutu, ketepatan penyajian atau struktur organisasi yang diterapkan pada suatu perusahaan.
3. Sebagai perbaikan dan pengendalian akuntansi, sistem akuntansi bisa mengecek internal untuk memperbaiki informasi akuntansi dan memberikan catatan lengkap tentang pertanggungjawaban dan perlindungan terhadap aset perusahaan.
4. Mengurangi biaya klerikal yang dihasilkan oleh suatu kegiatan bisnis.

Tujuan akuntansi secara khusus yaitu memberikan informasi dalam bentuk laporan yang memuat posisi keuangan, hasil usaha, dan perubahan posisi keuangan lainnya secara wajar sesuai Prinsip Prinsip Akuntansi Berterima Umum (PABU) atau *Generally Accepted Accounting Principles (GAAP)*.

2.1.1.3 Fungsi Akuntansi

Fungsi akuntansi yang paling utama adalah sebagai media informasi keuangan suatu organisasi karena dari laporan akuntansi kita dapat melihat seperti apa kualitas yang ada dalam suatu organisasi dan seperti apa perubahan yang terjadi dalam organisasi. Akuntansi memberikan informasi data kuantitatif dengan satuan ukuran uang. Informasi mengenai tata keuangan sangat dibutuhkan oleh pihak yang akan membuat keputusan dalam aktivitas selanjutnya baik orang yang ada di dalam organisasi maupun yang ada di luar organisasi.

Dalam akuntansi terdapat 2 macam informasi yang diberikan yaitu tentang nilai perusahaan dan informasi tentang untung rugi perusahaan. Kedua informasi tersebut bermanfaat untuk:

1. Mengetahui seberapa besar modal yang dimiliki suatu perusahaan.

2. Mengetahui seperti apa perkembangan maju mundurnya perusahaan.
3. Sebagai landasan untuk menghitung pajak.
4. Menjelaskan kondisi perusahaan saat membutuhkan kredit dari bank atau pihak lain.
5. Sebagai dasar untuk memutuskan kebijakan yang akan dilaksanakan.
6. Untuk menarik para investor saham jika perusahaan telah menjadi perseroan terbatas.

2.1.2 Laporan Keuangan

2.1.2.1 Definisi Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan salah satu sumber informasi keuangan suatu perusahaan mengenai posisi keuangan apakah keuangan perusahaan dalam keadaan baik atau sebaliknya. Informasi dalam laporan keuangan ini dapat membantu pihak-pihak yang berkepentingan sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Menurut PSAK 1 (Revisi 2014), laporan keuangan merupakan suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas.

Menurut Kasmir (2017:7), pengertian laporan keuangan adalah:

“Laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan saat ini atau dalam satu periode tertentu”.

Maksud laporan keuangan yang menunjukkan kondisi perusahaan saat ini adalah merupakan kondisi terkini. Kondisi perusahaan terkini adalah keadaan keuangan perusahaan pada tanggal tertentu (untuk laporan laba rugi).

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, laporan keuangan adalah sebagai berikut:

“Laporan keuangan merupakan laporan terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama periode pelaporan. Laporan keuangan digunakan untuk mengetahui sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintah, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisien suatu entitas pelaporan dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.”

Adapun komponen laporan keuangan menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang kemudian diperbaharui dengan keluarnya Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, adalah sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah dalam satu periode pelaporan. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan sekurang-kurangnya unsur-unsur yang terdiri dari pendapatan LRA, belanja, transfer, surplus-defisit LRA, pembiayaan, sisa lebih atau kurang LRA.

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Perubahan SAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos yaitu saldo anggaran lebih awal, penggunaan saldo anggaran lebih, sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran tahun berjalan, koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya dan lain-lain, saldo anggaran lebih akhir. Di samping itu, suatu entitas pelaporan menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

3. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Setiap entitas pelaporan mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan nonlancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca. Setiap entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos aset dan kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Neraca menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut:

- a) Kas dan setara kas;
- b) Investasi jangka pendek;
- c) Piutang pajak dan bukan pajak;
- d) Persediaan;
- e) Investasi jangka panjang;
- f) Aset tetap;
- g) Kewajiban jangka pendek;
- h) Kewajiban jangka panjang;
- i) Ekuitas.

4. Laporan Operasional (LO)

Laporan finansial mencakup laporan operasional yang menyajikan pos-pos sebagai berikut:

- a) Pendapatan-LO dari kegiatan operasional;
- b) Beban dari kegiatan operasional ;
- c) Surplus/defisit dari Kegiatan Non Operasional, bila ada;
- d) Pos luar biasa, bila ada;
- e) Surplus/defisit-LO.

5. Laporan Arus Kas (LAK)

Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.

6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos sebagai berikut:

- a) Ekuitas awal
- b) Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan
- c) Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya:
 - 1) Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya;
 - 2) Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.
- d) Ekuitas akhir.

7. Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)

Agar dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan membandingkannya dengan laporan keuangan entitas lainnya, Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- a) Informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi
- b) Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro
- c) Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target
- d) Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya
- e) Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan
- f) Informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan
- g) Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-

pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen-komitmen lainnya.

2.1.2.2 Tujuan Laporan Keuangan

Tujuan laporan keuangan bertujuan umum adalah untuk menyajikan informasi tentang posisi keuangan, performa keuangan, dan arus kas entitas yang berguna untuk berbagai pengguna dalam membuat keputusan ekonomi. Untuk memenuhi tujuan tersebut, laporan keuangan setidaknya harus memberikan informasi tentang aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan dan beban termasuk keuntungan dan kerugian, kontribusi dari dan distribusi kepada pemilik, dan arus kas (PSAK 1 tahun 2018).

Adapun menurut Abdul Hafiz Tanjung (2014:12), tujuan laporan keuangan pemerintah daerah adalah sebagai berikut:

1. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan pengguna sumber daya keuangan.
2. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai.
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan yang berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik

jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.

6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

2.1.2.3 Pengguna Laporan Keuangan

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), “Pemakai laporan keuangan meliputi investor sekarang dan investor potensial. Karyawan, pemberi pinjaman, pemasok dan kreditor usaha lainnya, pelanggan, pemerintah serta lembaga-lembaganya, dan masyarakat”. Mereka menggunakan laporan keuangan untuk memenuhi beberapa kebutuhan informasi yang berbeda. Beberapa kebutuhan ini meliputi:

1. Investor. Penanam modal beresiko dan penasehat mereka berkepentingan dengan resiko yang melekat serta hasil pengembangan dari investasi yang mereka lakukan. Mereka membutuhkan informasi untuk membantu menentukan apakah harus membeli, menahan, atau menjual investasi tersebut. Pemegang saham juga tertarik pada informasi yang memungkinkan mereka untuk menilai kemampuan perusahaan untuk membayar deviden.
2. Karyawan. Karyawan dan kelompok-kelompok yang mewakili mereka tertarik pada informasi mengenai stabilitas dan profitabilitas perusahaan. Mereka juga tertarik dengan informasi yang memungkinkan mereka untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memberikan balas jasa, manfaat pensiun, dan kesempatan kerja.

3. Pemberi pinjaman. Pemberi pinjaman tertarik dengan informasi keuangan yang memungkinkan mereka untuk mengetahui apakah pinjaman serta bunganya dapat dibayar pada saat jatuh tempo.
4. Pemasok dan kreditor usaha lainnya. Pemasok dan kreditor usaha lainnya tertarik dengan informasi yang memungkinkan mereka untuk mengetahui apakah jumlah yang terhutang akan dapat dibayar pada saat jatuh tempo. Kreditor usaha berkepentingan dengan informasi mengenai kelangsungan hidup perusahaan, terutama kalau mereka terikat dalam perjanjian jangka panjang dengan atau tergantung pada perusahaan.
5. Pelanggan. Para pelanggan berkepentingan dengan informasi mengenai kelangsungan hidup perusahaan, terutama kalau mereka terikat dalam perjanjian jangka panjang dengan, atau tergantung pada perusahaan.
6. Pemerintah. Pemerintah dan berbagai lembaga yang ada dibawah kekuasaannya berkepentingan dengan alokasi sumber daya, dan karena itu berkepentingan dengan aktivitas perusahaan. Mereka juga membutuhkan informasi untuk mengatur aktivitas perusahaan, menetapkan kebijakan pajak, dan sebagai dasar untuk menyusun statistik pendapatan nasional dan statistik lainnya.
7. Masyarakat. Perusahaan mempengaruhi anggota masyarakat dalam berbagai cara. Misalnya, perusahaan dapat memberikan kontribusi berarti pada perekonomian nasional, termasuk jumlah orang yang dipekerjakan dan perlindungan kepada penanam modal domestik. Laporan keuangan dapat membantu masyarakat dengan menyediakan informasi

kecenderungan (trend), dan perkembangan terakhir kemakmuran perusahaan serta rangkaian aktivitasnya.

2.1.2.4 Karakteristik Laporan Keuangan

Karakteristik penyajian laporan keuangan yang diatur menurut PSAK 1 adalah sebagai berikut:

1. Penyajian secara wajar dan kepatuhan terhadap PSAK

Laporan keuangan menyajikan secara wajar posisi keuangan, kinerja keuangan dan arus kas suatu entitas. Penyajian yang wajar mensyaratkan penyajian secara jujur dampak dari transaksi, peristiwa dan kondisi lain sesuai dengan definisi dan kriteria pengakuan aset, liabilitas, pendapatan dan beban. Entitas yang laporan keuangannya telah patuh terhadap SAK membuat pernyataan secara eksplisit dan tanpa kecuali tentang kepatuhan terhadap SAK tersebut dalam catatan atas laporan keuangan.

2. Kelangsungan usaha

Dalam menyusun laporan keuangan, manajemen membuat penilaian tentang kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usaha. Entitas menyusun laporan keuangan berdasarkan asumsi kelangsungan usaha, kecuali manajemen bertujuan untuk melikuidasi entitas atau menghentikan perdagangan, atau tidak mempunyai alternatif lainnya yang realistis selain melakukannya.

3. Dasar akrual

Entitas menyusun laporan keuangan atas dasar akrual, kecuali laporan arus kas. Ketika akuntansi berbasis akrual digunakan, entitas mengakui pos-pos

sebagai aset, laibilitas, ekuitas, pendapatan dan beban (unsur-unsur laporan keuangan).

4. Materialitas dan agregasi

Entitas menyajikan secara terpisah kelompok pos sejenis yang material. Entitas menyajikan secara terpisah pos yang mempunyai sifat atau fungsi berbeda kecuali pos tersebut tidak material. Entitas menyajikan secara terpisah kelompok pos sejenis yang material. Entitas menyajikan secara terpisah pos yang mempunyai sifat atau fungsi berbeda kecuali pos tersebut tidak material.

5. Saling hapus

Entitas tidak boleh melakukan saling hapus atas aset dan laibilitas atau pendapatan dan beban, kecuali disyaratkan atau diijinkan oleh suatu PSAK. Saling hapus dalam laporan laba rugi komprehensif atau laporan posisi keuangan atau dalam laporan laba rugi terpisah (jika disajikan) mengurangi kemampuan pengguna laporan keuangan baik untuk memahami transaksi, peristiwa dan kejadian lain yang telah terjadi maupun untuk menilai arus kas entitas di masa depan, kecuali jika saling hapus mencerminkan substansi transaksi atau peristiwa. Pengukuran aset secara neto setelah dikurangi penyisihan penilaian (misalnya, penyisihan keusangan atas persediaan dan penyisihan piutang tak tertagih) tidak termasuk kategori saling hapus.

6. Frekuensi pelaporan

Entitas menyajikan laporan keuangan lengkap (termasuk informasi komparatif) setidaknya secara tahunan. Jika akhir periode pelaporan

entitas berubah dan laporan keuangan tahunan disajikan untuk periode yang lebih panjang atau lebih pendek dari periode satu tahun, sebagai tambahan terhadap periode cakupan laporan keuangan, maka entitas mengungkapkan:

- Alasan penggunaan periode pelaporan yang lebih panjang atau lebih pendek
- Fakta bahwa jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan tidak dapat diperbandingkan secara keseluruhan.

7. Informasi komparatif

Informasi kuantitatif diungkapkan secara komparatif dengan periode sebelumnya untuk seluruh jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan periode berjalan, kecuali dinyatakan lain oleh SAK. Informasi komparatif yang bersifat naratif dan deskriptif dari laporan keuangan periode sebelumnya diungkapkan kembali jika relevan untuk pemahaman laporan keuangan periode berjalan.

8. Konsistensi penyajian

Penyajian dan klasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan antar periode harus konsisten kecuali:

- Setelah terjadi perubahan yang signifikan terhadap sifat operasi entitas atau review atas laporan keuangan, terlihat secara jelas bahwa penyajian atau pengklasifikasian yang lain akan lebih tepat untuk digunakan dengan mempertimbangkan kriteria untuk penentuan dan penerapan kebijakan akuntansi; atau
- Perubahan tersebut diperkenankan oleh suatu PSAK.

Adapun karakteristik laporan keuangan Pemerintah Daerah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan kemudian diperbaharui dengan keluarnya Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah yang dapat memenuhi kualitas laporan keuangan yang dikehendaki adalah sebagai berikut:

1. Relevan

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya.

Informasi yang relevan, yaitu:

a. Memiliki manfaat unpan balik (*feedback value*)

Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu.

b. Memiliki manfaat prediktif (*predictive value*)

Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.

c. Tepat waktu

Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.

d. Lengkap

Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dengan memperhatikan kendala yang ada. Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan yang diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.

2. Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka pengguna informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik:

- a. Penyajian yang jujur.
- b. Dapat diverifikasi (diuji).
- c. Netralitas (tidak berpihak kepada siapapun).

3. Dapat dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang dibandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang

sama. Apabila entitas pemerintah menerapkan kebijakan akuntansi yang baik dari pada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.

4. Dapat dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk para pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

2.1.3 Aset Tetap

2.1.3.1 Definisi Aset Tetap

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (RI) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang kemudian diperbaharui dengan keluarnya Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Adapun Aset tetap menurut Peraturan Pemerintah RI Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang kemudian diperbaharui dengan keluarnya Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

2.1.3.2 Klasifikasi Aset Tetap

Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut:

1) Tanah

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

2) Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

3) Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

4) Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap pakai.

5) Aset Tetap Lainnya, dan

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

6) Kontruksi dalam Pengerjaan.

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.

Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

2.1.3.3 Pengakuan Aset Tetap

Menurut Peraturan Pemerintah RI Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dalam hal pengakuan aset, aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal.

Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:

- a) Berwujud
- b) Mempunyai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan
- c) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal
- d) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas, dan
- e) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh pemerintah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual. Pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

Saat pengakuan aset akan dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

2.1.3.4 Pengukuran Aset Tetap

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Pengukuran dapat dipertimbangkan andal bila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasi biayanya. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.

Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

2.1.3.5 Penilaian Awal Aset Tetap

Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan. Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh.

Untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya perolehan aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun. Untuk periode selanjutnya setelah tanggal neraca awal, atas perolehan

aset tetap baru, suatu entitas menggunakan biaya perolehan atau harga wajar bila biaya perolehan tidak ada.

1. Komponen Biaya

Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan maupun yang masih harus dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai.

Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan. Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dan yang masih harus dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan dan yang masih harus dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak. Biaya perolehan jalan, irigasi, dan jaringan menggambarkan seluruh biaya yang

dikeluarkan dan yang masih harus dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi, dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai. Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan dan yang masih harus dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.

2. Kontruksi dalam Pengerjaan

Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 08 mengenai Konstruksi Dalam Pengerjaan mengatur secara rinci mengenai perlakuan aset dalam pengerjaan, termasuk di dalamnya adalah rincian biaya konstruksi aset tetap baik yang dikerjakan secara swakelola maupun yang dikerjakan oleh kontraktor.

Konstruksi Dalam Pengerjaan yang sudah selesai dibuat atau dibangun dan telah siap dipakai harus segera direklasifikasikan ke salah satu akun yang sesuai dalam pos aset tetap.

3. Perolehan Secara Gabungan

Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

4. Pertukaran Aset (*Exchanges Of Asssets*)

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas dan kewajiban lain yang ditransfer/diserahkan.

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas.

5. Aset Donasi

Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Sumbangan aset tetap didefinisikan sebagai transfer tanpa persyaratan suatu aset tetap ke satu entitas, misalnya perusahaan nonpemerintah memberikan bangunan yang dimilikinya untuk digunakan oleh satu unit pemerintah tanpa persyaratan apapun.

Penyerahan aset tetap tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya akta hibah. Apabila perolehan aset tetap memenuhi kriteria perolehan aset donasi, maka perolehan tersebut diakui sebagai aset donasi.

2.1.3.6 Pengeluaran setelah Perolehan

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.

Dikarenakan organisasi pemerintah sangatlah beragam dalam jumlah dan penggunaan aset tetap, maka suatu batasan jumlah biaya kapitalisasi (*capitalization thresholds*) tidak dapat diseragamkan untuk seluruh entitas yang ada. Masing-masing entitas harus menetapkan batasan jumlah tersebut dengan mempertimbangkan kondisi keuangan dan operasionalnya. Bila telah terbentuk maka batasan jumlah biaya kapitalisasi (*capitalization thresholds*) harus diterapkan secara konsisten dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

2.1.3.7 Pengukuran Berikutnya (*Subsequent Measurement*) Terhadap Pengakuan Awal

Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun ekuitas.

1. Penyusutan

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai

pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.

Penyesuaian nilai aset tetap dilakukan dengan berbagai metode yang sistematis sesuai dengan masa manfaat. Metode penyusutan yang digunakan harus dapat menggambarkan manfaat ekonomi atau kemungkinan jasa (*service potential*) yang akan mengalir ke pemerintah. Masa manfaat aset tetap yang dapat disusutkan harus ditinjau secara periodik dan jika terdapat perbedaan besar dari estimasi sebelumnya, penyusutan periode sekarang dan yang akan datang harus dilakukan penyesuaian.

Metode penyusutan yang dapat dipergunakan antara lain:

- a) Metode garis lurus (*straight line method*)
- b) Metode saldo menurun ganda (*double declining balance method*)
- c) Metode unit produksi (*unit of production method*).

Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut.

2. Penilaian Kembali Aset Tetap (*Revaluation*)

Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap pada umumnya tidak diperkenankan karena Standar Akuntansi Pemerintahan menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional. Dalam hal ini laporan keuangan harus menjelaskan mengenai penyimpangan dari konsep biaya perolehan di dalam penyajian aset tetap serta pengaruh penyimpangan tersebut terhadap gambaran keuangan suatu entitas.

Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat aset tetap dibukukan dalam akun ekuitas.

2.1.3.8 Penghentian dan Pelepasan (*Retirement and Disposal*)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang. Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Adapun menurut PSAK 16 (Revisi 2011), jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat:

- a) Dilepaskan, atau
- b) Tidak ada manfaat ekonomis dimasa depan yang diharapkan dari pengguna atau pelepasannya.

Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset tetap harus dimasukkan dalam laporan laba rugi pada saat aset tersebut dihentikan pengakuannya (kecuali PSAK no 30 mengharuskan perlakuan yang berbeda dalam hal transaksi jual dan sewa balik). Laba tidak boleh diklasifikasikan sebagai pendapatan. Pelepasan aset tetap dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya: dijual, dsewakan berdasarkan sewa pembiayaan atau disumbangkan. Jika berdasarkan prinsip pengakuan dalam paragraph 7, suatu entitas mengakui biaya perolehan dari penggantian sebagian aset tetap dalam jumlah tercatat aset

tetap tersebut, maka selanjutnya entitas tersebut juga menghentikan pengakuan jumlah tercatat dari bagian yang digantikan tanpa memperhatikan apakah bagian yang digantikan telah disusutkan secara terpisah.

Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan suatu aset tetap harus ditentukan sebesar perbedaan antara jumlah netto hasil pelepasan, jika ada, dan jumlah tercatat dari aset tersebut. Piutang atau pelepasan aset tetap diakui pada saat awal sebesar nilai wajarnya. Jika pembayaran untuk hal tersebut ditangguhkan, perhitungan yang akan diterima diakui pada saat awal sebesar nilai tunai.

2.1.3.9 Pengungkapan

Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut:

1. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (carrying amount).
2. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
 - a) Penambahan
 - b) Pelepasan
 - c) Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada;
 - d) Mutasi aset tetap lainnya.
3. Informasi penyusutan, meliputi:
 - a) Nilai penyusutan
 - b) Metode penyusutan yang digunakan
 - c) Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan

d) Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.

2.1.4 Kualitas Laporan Keuangan

Kualitas memiliki banyak makna bagi setiap orang sehingga pengertian kualitas dapat berbeda, hal tersebut disebabkan karena kualitas memiliki banyak kriteria dan sangat tergantung pada konteksnya.

Menurut Erlina, Rasdianto (2013:146), kualitas laporan keuangan pemerintah daerah adalah sebagai berikut:

“Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah adalah suatu hasil dari proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dari transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas akuntansi yang ada dalam suatu pemerintah daerah yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan keuangan entitas akuntansi dan pengembalian keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan.”

Adapun karakteristik laporan keuangan Pemerintah Daerah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan kemudian diperbaharui dengan keluarnya Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah yang dapat memenuhi kualitas laporan keuangan yang dikehendaki adalah sebagai berikut:

1. Relevan

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di

masa lalu. Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya.

Informasi yang relevan, yaitu:

e. Memiliki manfaat unpan balik (*feedback value*)

Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu.

f. Memiliki manfaat prediktif (*predictive value*)

Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.

g. Tepat waktu

Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.

h. Lengkap

Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dengan memperhatikan kendala yang ada. Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan yang diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.

2. Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka pengguna informasi tersebut

secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik:

- d. Penyajian yang jujur.
- e. Dapat diverifikasi (diuji).
- f. Netralitas (tidak berpihak kepada siapapun).

3. Dapat dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang dibandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah menerapkan kebijakan akuntansi yang baik dari pada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.

4. Dapat dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk para pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

2.2 Kerangka Pemikiran

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang kemudian diperbaharui dengan keluarnya Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa, komponen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terdiri atas salah satunya yaitu Neraca. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, utang dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang kemudian diperbaharui dengan keluarnya Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah, perlakuan Akuntansi atas aset tetap adalah sebagai berikut:

1. Pengakuan Aset Tetap
2. Pengukuran Aset Tetap
3. Penilaian Awal Aset Tetap
4. Pengeluaran setelah Perolehan
5. Pengukuran berikutnya terhadap Pengakuan Awal:
 - Penyusutan
 - Penilaian Kembali (*Revaluation*)
6. Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap
7. Pengungkapan Aset Tetap

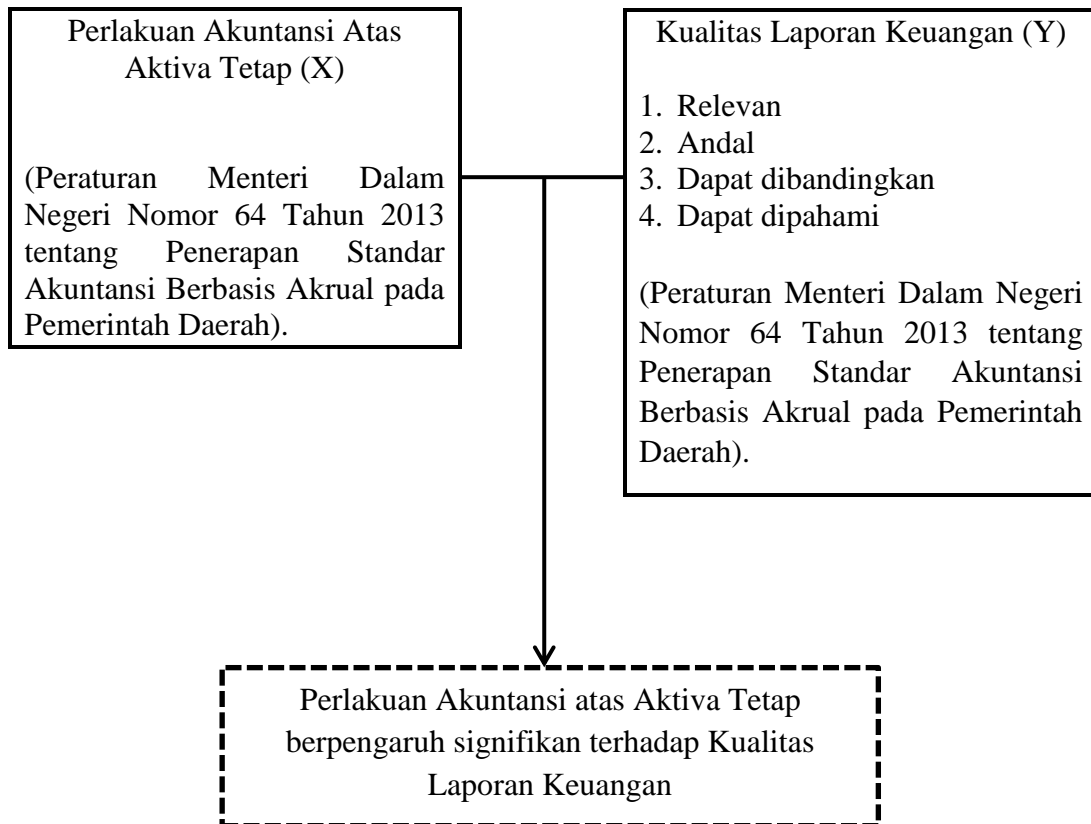
Diharapkan dengan dilaksanakannya penerapan perlakuan Akuntansi atas Aset tetap sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI pada

Pemerintah Daerah dapat mempengaruhi tujuan yang akan diambil, sehingga kesimpulan akhir dari berhasil tidaknya penerapan tersebut adalah tercermin dari kualitas informasi laporan keuangan Pemerintah Daerah. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) memberikan informasi mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama periode pelaporan.

Laporan keuangan digunakan untuk mengetahui sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintah, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisien suatu entitas pelaporan dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang kemudian diperbaharui dengan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, karakteristik Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang dapat memenuhi kualitas laporan keuangan yang dikehendaki adalah sebagai berikut : Relevan, Andal, Dapat dibandingkan, dan Dapat dipahami.

Didukung penelitian Alkhyar Tipan, David Paul Elia Saerang, dan Robert Lambey (2015) dengan judul "Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap pada Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Sulawesi Utara", bahwa perlakuan akuntansi aset tetap telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 pernyataan nomor 07 tentang akuntansi aset tetap dan sangat berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan yang dihasilkan.

Adapun bagan kerangka pemikiran dapat dilihat pada gambar 2.1 berikut ini:



Gambar 2.1

Bagan Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2017: 99), hipotesis didefinisikan sebagai jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan.

Berdasarkan uraian dalam kerangka pemikiran, maka dapat dikemukakan hipotesis sebagai berikut:

H₀ : Perlakuan Akuntansi atas Aktiva tetap berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

H₁ : Perlakuan Akuntansi atas Aktiva tetap tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

BAB III

OBJEK DAN METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan sesuatu yang menjadi sasaran dalam penelitian ilmiah, objek penelitian ini menjadi sasaran dalam penelitian untuk mendapatkan jawaban ataupun solusi dari permasalahan yang terjadi. Menurut Sugiyono (2017:41), objek penelitian adalah sasaran ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu tentang suatu hal objektif, valid dan *reliable* tentang suatu hal (variabel tertentu).

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah akuntansi atas aktiva tetap dan kualitas laporan keuangan. Lalu subjek dalam penelitian ini adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bandung.

3.1.1 Gambaran Umum Perusahaan

3.1.1.1 Visi dan Misi Perusahaan

- Visi BPKA : Mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset daerah di kota Bandung yang wajar tanpa pengecualian.
- Misi BPKA:
 1. Mewujudkan anggaran daerah yang berbasis kinerja dan tepat waktu.
 2. Mewujudkan penatausahaan keuangan daerah sesuai peraturan perundangan.
 3. Mewujudkan penatausahaan aset daerah sesuai perundangan.
 4. Mewujudkan laporan keuangan dan kinerja yang transparan dan akuntabel.

3.1.1.2 Sejarah Singkat dan Kedudukan

Badan pengelolaan Keuangan dan Aset kota Bandung dimana BPKA dibentuk berdasarkan Peraturan daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah kota Bandung yang ditetapkan tanggal 18 November 2016. Sebelum dibentuk BPKA, pada tahun 2009 dibentuk Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah berdasarkan Perda Nomor 13 Tahun 2009 tentang perubahan atas Peraturan daerah kota Bandung Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah kota Bandung yang ditetapkan pada 7 Agustus 2009.

Badan pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kota Bandung (BPKAD) dibentuk berdasarkan Peraturan daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah kota Bandung yang ditetapkan tanggal 18 November 2016. Sebelum dibentuk BPKA, pada tahun 2009 dibentuk Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah berdasarkan Perda Nomor 13 Tahun 2009 tentang perubahan atas Peraturan daerah kota Bandung Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah kota Bandung yang ditetapkan pada 7 Agustus 2009.

3.2 Metode Penelitian

Menurut Sugiyono (2017:2) yang dimaksud metode penelitian adalah sebagai berikut :

“Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu”.

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa metode penelitian merupakan cara pemecahan masalah penelitian yang dilaksanakan secara terencana dan cermat dengan maksud mendapatkan fakta dan kesimpulan agar dapat memahami, menjelaskan, meramalkan, dan mengendalikan keadaan.

3.2.1 Metode yang Digunakan

Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode kualitatif. Menurut Sugiyono (2017:8) mengatakan bahwa:

“Metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*); disebut juga sebagai metode *ethnographi* (etnografi), karena pada awalnya metode ini lebih banyak digunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya; disebut sebagai metode kualitatif, karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif”.

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif verifikatif dengan pendekatan survey. Pendekatan penelitian yang dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dan verifikatif, karena untuk mengetahui hubungan kausalitas antara variabel melalui suatu pengujian dan perhitungan statistik didapat hasil pembuktian yang menunjukkan hipotesis ditolak atau diterima.

Dengan metode analisis deskriptif dapat diselidiki fenomena atau kunci permasalahan dari penelitian tersebut. Metode deskriptif merupakan penelitian yang dilakukan untuk mengetahui keberadaan variabel mandiri, baik hanya pada satu variabel atau lebih (variabel yang berdiri sendiri) tanpa membuat perbandingan dan mencari hubungan variabel itu dengan variabel yang lain (Sugiyono, 2017:35). Dalam penelitian ini, metode deskriptif digunakan untuk menjelaskan tentang akuntansi aktiva tetap dan kualitas laporan keuangan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bandung.

Adapun definisi Metode Verifikatif menurut sugiyono (2017:8) adalah sebagai berikut:

“Penelitian yang dilakukan terhadap populasi atau sampel tertentu dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan “.

Dalam penelitian ini, metode verifikatif digunakan untuk menjelaskan tentang adakah pengaruh perlakuan akuntansi aktiva tetap terhadap kualitas laporan keuangan pada BPKAD Kota Bandung.

3.2.2 Operasionalisasi Variabel Penelitian

Menurut Sugiyono (2017:39) variabel penelitian pada dasarnya adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa operasionalisasi variabel diperlukan untuk menentukan jenis, indikator, serta skala dari variabel-variabel yang terkait dalam penelitian, sehingga pengujian hipotesis dengan alat bantu statistik dapat dilakukan secara benar.

Dalam penelitian ini membahas tentang pengaruh akuntansi aktiva tetap terhadap kualitas laporan keuangan, maka variabel dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:

a. Variabel Bebas (*Independent Variable*)

Variabel bebas (*independent variable*) merupakan variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel terikat (*dependent variable*). Variabel bebas dalam penelitian ini adalah akuntansi aktiva tetap dengan notasi X.

b. Variabel Terikat (*Dependent Variable*)

Variabel terikat (*dependent variable*), yaitu variabel yang diamati dan diukur untuk menentukan pengaruh yang disebabkan oleh variabel bebas.

Variabel terikat disini adalah kualitas laporan keuangan dengan notasi Y.

Uraian korelasi variabel-variabel diatas, selanjutnya digambarkan dalam dimensi dan indikator yang dipaparkan pada tabel berikut ini.

Tabel 3.1 Operasionalisasi Variabel

Variabel	Dimensi	Indikator	Skala	Nomor kuisisioner
X = Akuntansi atas Aktiva Tetap	Penerapan perlakuan akuntansi atas aktiva tetap sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada pemerintah daerah. (Peraturan Menteri Dalam Negeri No.64 Tahun 2013)	8. Pengakuan Aset Tetap	Ordinal	1a,1b
		9. Pengukuran Aset Tetap		2
		10. Penilaian Awal Aset Tetap		3
		11. Pengeluaran setelah Perolehan		4
		12. Pengukuran berikutnya terhadap Pengakuan Awal: - Penyusutan - Penilaian Kembali (<i>Revaluation</i>)		5a,5b
		13. Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap		6
		14. Pengungkapan Aset Tetap		7a,7b
Y = Kualitas Laporan Keuangan	Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama	5. Dapat dipahami	Ordinal	1
		6. Relevan		2
		7. Andal		3a,3b,3c
		8. Dapat dibandingkan		4

	<p>satu periode pelaporan. (Peraturan Menteri Dalam Negeri No.64 Tahun 2013).</p> <p>Karakteristik kualitas laporan keuangan dasar akrual dapat diukur dari : relevan, andal, dapat dipahami, dan dapat dibandingkan. (Peraturan Menteri Dalam Negeri No.64 Tahun 2013).</p>			
--	--	--	--	--

Dalam operasional variabel ini semua variabel menggunakan skala ordinal. Menurut Nanang Martono (2014:65) penjelasan tentang skala ordinal adalah sebagai berikut:

“Skala ordinal memiliki semua karakteristik skala nominal. Perbedaannya adalah skala ini memiliki urutan atau peringkat antar kategori. Angka yang digunakan hanya menentukan posisi dalam suatu seri yang urut, bukan nilai absolut, namun angka tersebut tidak dapat ditambahkan, dikurangi, dikalikan, maupun dibagi (tidak berlaku operasi matematika)”.

Skala ordinal digunakan untuk memberikan informasi nilai pada jawaban. Variabel penelitian diukur dengan menggunakan instrumen pengukur dalam bentuk kuesioner berskala ordinal yang memenuhi pernyataan-pernyataan tipe Skala *Likert*. Menurut Sugiyono (2017:93) yang dimaksud dengan Skala *Likert* adalah sebagai berikut :

“Skala *Likert* digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dengan menggunakan skala *Likert*, maka variabel yang diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun tim-item instrumen yang dapat berupa pertanyaan.”

Berdasarkan pernyataan tersebut, maka setiap pertanyaan pada kuesioner peneliti, menetapkan skor-skor dalam tabel halaman berikutnya :

Tabel 3.2 Tabel *Scoring* Skala *Likert*

Pernyataan	Skor
Sangat Setuju (SS)	5
Setuju (S)	4
Ragu-Ragu (RR)	3
Tidak Setuju (TS)	2
Sangat Tidak Setuju (STS)	1

Sumber : (Sugiyono, 2017:93)

3.2.3 Populasi dan Teknik Penentuan Sampel

3.2.3.1 Populasi

Populasi dalam suatu penelitian merupakan kumpulan individu atau objek yang merupakan sifat-sifat umum. Menurut Sugiyono (2017:80), populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Maka dari penjelasan tersebut penulis menetapkan populasi dari penelitian ini adalah Pegawai Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung namun hanya pada bidang akuntansi dan bidang pencatatan dan pelaporan aset yang berjumlah 46 orang.

3.2.3.2 Teknik Penentuan Sampel

Penarikan atau pengambilan sampel dari populasi untuk mewakili populasi disebabkan untuk mengangkat kesimpulan penelitian sebagai suatu yang berlaku bagi populasi. Menurut Sugiyono (2017:81), sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengambilan sampel berdasarkan kriteria responden yang terdiri atas jenis kelamin, jabatan, pendidikan terakhir, lama bekerja, dan kursus atau diklat yang pernah diikuti oleh responden. Berdasarkan beberapa kriteria responden yang ditetapkan oleh peneliti, maka yang memenuhi kriteria responden untuk dijadikan sampel serta digunakan peneliti berdasarkan populasi tersebut yaitu menjadi 32 orang.

3.2.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis yaitu metode penelitian survey digunakan untuk mendapatkan data dari tempat tertentu yang alamiah (bukan buatan), peneliti melakukan perlakuan dengan mengedarkan kuesioner. Menurut Sugiyono (2017:142), Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya.

Sumber data yang akan digunakan oleh penulis adalah data primer. Menurut Sugiyono (2017:137) mendefinisikan data primer adalah sebagai berikut:

“Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data”.

Pengumpulan data primer dalam penelitian ini dengan cara menyebarkan kuesioner dan melakukan wawancara secara langsung dengan pihak-pihak yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan.

3.2.5 Rancangan Pengujian Hipotesis

3.2.5.1 Analisis Data

Menurut Sugiyono (2016:334) mendefinisikan analisis data sebagai berikut :

“Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain”.

Analisis data dilakukan untuk menjawab rumusan masalah atau menguji hipotesis yang telah dirumuskan, untuk mempermudah melakukan analisis data maka penulis menggunakan alat bantu komputer dengan menggunakan *software* SPSS versi 23.

3.2.5.2 Uji Instrumen Penelitian

Setelah dilakukan pembobotan untuk masing-masing variabel, tindakan yang selanjutnya dilakukan adalah melakukan pengujian terhadap instrumen yang akan dipakai untuk mengumpulkan data. Tujuan pengujian ini adalah untuk mengetahui apakah ada data yang dihasilkan dari instrumen tersebut dapat menjamin mutu dari penelitian, sehingga kesimpulan-kesimpulan atau alasan-alasan yang dikemukakan terhadap hubungan antar variabel dapat dipercaya, akurat, dan dapat diandalkan sehingga hasil penelitian bisa diterima. Instrumen dapat dikatakan memenuhi persyaratan sebagai alat pengumpul data jika instrumen tersebut valid dan reliabel (*reliable*).

a. Uji Validitas

Validitas berasal dari kata *validity* yang mempunyai arti sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Suatu

alat ukur atau instrumen pengukuran dapat dikatakan memiliki validitas yang tinggi apabila alat tersebut menjalankan fungsi ukurnya, atau memberikan hasil ukur yang sesuai dengan maksud dilakukannya pengukuran tersebut. Alat yang menghasilkan data yang tidak relevan dengan tujuan pengukuran dikatakan sebagai alat ukur yang memiliki validitas rendah. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Adapun rumus *Product Moment Pearson* adalah sebagai berikut :

$$r = \frac{n\Sigma XY - (\Sigma X \Sigma Y)}{\sqrt{((n\Sigma X^2) - (\Sigma X)^2)((n\Sigma Y^2) - (\Sigma Y)^2)}}$$

Rumus *Product Moment Pearson*

Keterangan

- r = Koefisien korelasi
- n = Banyaknya responden
- X = Variabel bebas
- Y = Variabel terikat
- ΣX = Jumlah skor dalam variabel X
- ΣY = Jumlah skor dalam variabel Y
- ΣX^2 = Jumlah kuadrat masing-masing variabel X
- ΣY^2 = Jumlah kuadrat masing-masing variabel Y

Jika Koefisien korelasi (r) bernilai positif dan lebih besar dari r tabel, maka dinyatakan bahwa butir pertanyaan tersebut valid atau sah. Sebaliknya jika bernilai negatif, atau positif namun lebih kecil dari r tabel, maka butir pertanyaan dinyatakan tidak valid.

b. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas merupakan tingkat kepercayaan dari hasil suatu pengukuran. Dalam hal ini suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Uji reliabilitas digunakan mengukur bahwa variabel yang digunakan benar-benar bebas dari kesalahan sehingga menghasilkan hasil yang konsisten meskipun diuji berkali-kali.

Teknik perhitungan koefisien reliabilitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Cronbach Alpha*. Jika nilai koefisien *alpha* lebih besar dari 0,7 maka disimpulkan bahwa instrumen penelitian tersebut handal atau reliabel. Berikut ini rumus uji *Cronbach Alpha* :

$$\alpha = \frac{k \cdot r}{a + (k - 1)r}$$

Keterangan

a = Koefisien keandalan alat ukur

r = Koefisien rata-rata korelasi antar variabel

k = Jumlah variabel

c. Transformasi Data Ordinal Menjadi Interval

Sebelum melakukan analisis regresi dilakukan transformasi data dengan mengubah data ordinal menjadi interval, metode transformasi yang digunakan yaitu *Method of Successive Interval* (MSI). Secara garis besar langkah *Method of Successive Interval* adalah sebagai berikut:

1. Memperhatikan frekuensi setiap responden yaitu banyaknya responden yang memberikan respon untuk masing-masing kategori yang ada.

2. Menentukan nilai populasi setiap responden yaitu dengan membagi setiap bilangan pada frekuensi, dengan banyaknya responden keseluruhan.
3. Jumlah proporsi secara keseluruhan (setiap responden), sehingga diperoleh proporsi kumulatif.
4. Tentukan nilai Z untuk setiap proporsi kumulatif.
5. Menghitung *Scale Value* (SV) untuk masing-masing responden, dengan rumus sebagai berikut :

$$SV = \frac{(Density\ at\ Lower\ Limit) - (Density\ at\ Upper\ Limit)}{(Area\ Below\ Upper\ Limit) - (Area\ Below\ Lower\ Limit)}$$

Keterangan :

Density at lower limit = Kepadatan batas bawah

Density at upper limit = Kepadatan batas atas

Area bellow upper limit = Daerah batas atas bawah

Area bellow lower limit = Daerah bawah batas bawah

Menentukan nilai transformasi Y = $SV + (1 + |SV_{min}|)$

3.2.5.3 Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah distribusi variabel terikat untuk nilai variabel bebas tertentu berdistribusi normal atau tidak. Dalam model regresi linier, asumsi ini ditunjukkan oleh nilai *error* (e) yang berdistribusi normal. Model regresi yang baik adalah model regresi yang memiliki distribusi normal atau mendekati normal, sehingga layak digunakan untuk pengujian statistik. Pengujian normalitas data menggunakan *Test of Normality Kolmogorov-Smirnov* dalam program SPSS.

Menurut Singgih Santoso (2012:393) dasar pengambilan keputusan bisa dilakukan berdasarkan profitabilitas (*Asymtotic Significance*), yaitu:

1. Jika probabilitas > 0,05 maka distribusi dari model regresi adalah normal.
2. Jika probabilitas < 0,05 maka distribusi model regresi adalah tidak normal.

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah nilai kesalahan taksiran model regresi mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data residual normal atau mendekati normal.

Uji normalitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Kolmogorov Smirnov Test* menggunakan Program SPSS.

3.2.5.4 Uji Hipotesis

a. Uji Hipotesis Secara Simultan (Uji F)

Uji Statistik yang digunakan pada pengujian simultan adalah Uji F atau yang biasa disebut dengan Analysis of varian (ANOVA). Pada pengujian simultan akan diuji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Uji F dalam penelitian ini digunakan untuk menguji signifikansi pengaruh perlakuan akuntansi atas aktiva tetap terhadap kualitas laporan keuangan secara simultan.

Menurut Sugiyono (2017:192), dirumuskan sebagai berikut :

$$F = \frac{R^2/k}{(1 - R^2)/(n - k - 1)}$$

Keterangan :

R^2 = Koefisien determinasi

k = Jumlah variabel independen

n = Jumlah anggota sampel

Kriteria Uji :

- a. Jika f hitung > f tabel atau nilai sig < α maka H_0 ditolak dan H_a diterima (berpengaruh).

- b. Jika $f_{\text{Hitung}} < f_{\text{Tabel}}$ atau nilai $\text{sig} > \alpha$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak (tidak berpengaruh).

3.2.5.5 Analisis Regresi Linear Sederhana

Regresi sederhana didasarkan pada hubungan fungsional ataupun kausal satu variabel independen dengan satu variabel dependen. Tujuan analisis regresi adalah untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y) (Danang suntoyo, 2016:47).

Untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen yaitu perlakuan akuntansi atas aktiva tetap (X) terhadap variabel dependen yaitu kualitas laporan keuangan (Y), maka digunakan analisis linear sederhana. Persamaan rumus regresi linear sederhana adalah sebagai berikut:

$$Y = a + bx$$

Di mana nilai a dan b dicari terlebih dahulu dengan persamaan variabel sebagai berikut :

$$a = \frac{(\sum X^2)(\sum Y) - (\sum X)(\sum XY)}{n\sum X^2 - (\sum X)^2}$$

$$b = \frac{n(\sum XY) - (\sum X)(\sum Y)}{n\sum X^2 - (\sum X)^2}$$

Keterangan :

X = Variabel independen

Y = Variabel dependen

a = Konstanta (Nilai Y pada saat nol)

b = Koefisien Regresi

n = Banyaknya sampel

3.2.5.6 Analisis Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui berapa persentase variabel X (perlakuan akuntansi atas aktiva tetap) mempengaruhi variabel Y (kualitas laporan keuangan).

Maka rumus Koefisien Determinasi adalah sebagai berikut :

$$KD = rs^2 \cdot 100\%$$

Keterangan :

KD = Koefisien determinasi

rs^2 = Kuadrat koefisien korelasi

3.2.5.7 Rancangan Kuesioner

Menurut Sugiyono (2017:142), Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Peneliti menggunakan jenis kuesioner tertutup yaitu, kuesioner yang dibagikan sudah tersedia jawabannya sehingga responden tinggal memilih. Kuesioner dibagikan pada bidang akuntansi dan bidang pencatatan dan pelaporan aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung. Kuesioner terdiri dari 16 pertanyaan yang terdiri dari 10 pertanyaan variabel X (perlakuan akuntansi atas aktiva tetap) dan 6 pertanyaan variabel Y (kualitas laporan keuangan).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Pengujian Instrumen Penelitian dan Karakteristik Responden

Hasil Penelitian ini merupakan suatu gambaran atau deskripsi mengenai perlakuan akuntansi atas aktiva tetap terhadap kualitas laporan keuangan. Penyebaran kuesioner ditujukan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung. Kuesioner dibagikan kepada para responden yang telah ditentukan sebelumnya, dimana dari 32 kuesioner yang dibagikan mendapat respon yang positif dan diisi secara lengkap.

Karakteristik responden dimaksudkan untuk mengidentifikasi responden, sehingga dapat lebih memudahkan dalam menganalisis dan memahami suatu objek dan subjek penelitian. Untuk seluruh responden dalam penelitian ini penulis membagikan kuesioner terhadap bagian akuntansi dan bagian pencatatan dan pelaporan aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung.

4.1.1 Karakteristik Responden

Responden dalam penelitian ini merupakan karyawan/pegawai bagian akuntansi dan bagian pencatatan dan pelaporan aset di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung. Data responden yang berhasil dikumpulkan dari penelitian ini adalah sebanyak 32 responden.

Berikut ini adalah data penyebaran kuesioner yang ditunjukkan dalam tabel 4.1 pada halaman berikutnya, adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1

Data Penyebaran Kuesioner

No	Keterangan	Jumlah
1	Kuesioner yang disebar	32
2	Kuesioner yang tidak kembali	0
3	Kuesioner yang kembali	32
4	Kuesioner yang diolah	32
5	Tingkat Pengembalian	100%

Sumber : Data primer yang diolah

Dari tabel 4.3 di atas menunjukkan jumlah kuesioner yang disebar adalah sebanyak 32 kuesioner, dan semua kuesioner kembali atau dengan tingkat pengembalian 100%. Sehingga jumlah kuesioner yang diolah adalah 32 data. Selanjutnya, dari 32 data yang diolah tersebut dapat diketahui data demografi. Berikut deskripsi identitas responden penelitian yang terdiri dari jenis kelamin, jabatan, pendidikan, lama bekerja, dan kursus atau diklat.

a. Deskripsi Responden berdasarkan Jenis Kelamin

Karakteristik Responden berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat dalam tabel 4.2 berikut :

Tabel 4.2

Deskripsi Responden berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis kelamin	Jumlah	Presentase (%)
1	Laki-laki	17	53,125
2	Perempuan	15	46,875
Total		32	100

Sumber : Data primer yang diolah

Berdasarkan tabel 4.2 dapat dilihat bahwa jumlah responden yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 17 orang sedangkan responden yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 15 orang.

b. Deskripsi Responden berdasarkan Jabatan

Tabel 4.3

Deskripsi Responden berdasarkan Jabatan

No	Jabatan	Jumlah	Presentase (%)
1	Kepala Bidang	2	6,25
2	Kepal Sub-bidang	4	12,5
3	Staf	26	81,25
Total		32	100

Sumber : Data primer yang diolah

Berdasarkan tabel 4.3 di atas dapat dijelaskan bahwa jumlah responden yang memiliki jabatan di BPKA sebagai Kepala Bidang sebanyak 2 orang, responden yang memiliki jabatan sebagai Kepala Sub-bidang sebanyak 4 orang, dan responden yang memiliki jabatan sebagai staf/karyawan sebanyak 26 orang.

c. Deskripsi Responden berdasarkan Pendidikan

Karakteristik responden berdasarkan pendidikan terakhir dapat dilihat dalam tabel 4.4 berikut :

Tabel 4.4

Deskripsi Responden berdasarkan Pendidikan Terakhir

No	Pendidikan Terakhir	Jumlah	Presentase (%)
1	SLTA Se-Derajat	1	3,125
2	Diploma	0	0
3	Strata 1	22	68,75
4	Strata 2	9	28,125
5	Strata 3	0	0
Total		32	100

Sumber : Data primer yang diolah

Berdasarkan tabel 4.4 diketahui bahwa responden yang berpendidikan SLTA sebesar 3,125% atau sebanyak 1 orang, berpendidikan Diploma sebesar 0%

artinya tidak ada, sedangkan yang berpendidikan Strata 1 sebesar 68,75% atau sebanyak 22 orang, dan yang berpendidikan Strata 2 sebesar 28,125% atau sebanyak 9 orang, serta yang berpendidikan Strata 3 sebesar 0% artinya tidak ada. Mayoritas responden yang bekerja pada Bagian Akuntansi dan Bagian Pencatatan dan Pelaporan Aset di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung adalah berpendidikan Sarjana (S1).

d. Deskripsi Responden berdasarkan Lama Bekerja

Tabel 4.5

Deskripsi responden berdasarkan Lama Bekerja

No	Keterangan	Jumlah	Presentase (%)
1	1-5 Tahun	7	21,875
2	6-10 Tahun	2	6,25
3	11-15 Tahun	16	50
4	16-20 Tahun	6	18,75
5	>21 Tahun	1	3,125
Total		32	100

Sumber : Data primer yang diolah

Berdasarkan tabel 4.4 diketahui bahwa responden yang memiliki masa kerja selama 1-5 tahun sebesar 21,875% atau sebanyak 7 orang, responden yang memiliki masa kerja selama 6-10 tahun sebesar 6,25% atau sebanyak 2 orang, sedangkan yang memiliki masa kerja selama 11-15 tahun sebesar 50% atau sebanyak 16 orang, dan yang memiliki masa kerja selama 16-20 tahun sebesar 18,75% atau sebanyak 6 orang, serta yang memiliki masa kerja selama >21 tahun sebesar 3,125% atau sebanyak 1 orang. Mayoritas responden yang bekerja pada Bagian Akuntansi dan Bagian Pencatatan dan Pelaporan Aset di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung memiliki masa kerja selama 11-15 tahun.

- e. **Deskripsi Responden berdasarkan Kursus atau Diklat yang pernah diikuti.**

Tabel 4.6

Deskripsi responden berdasarkan kursus atau diklat yang pernah diikuti

No	Keterangan	Jumlah	Presentase (%)
1	Tidak Pernah	0	0
2	Pernah	31	96,875
3	Sering	1	3,125
Total		32	100

Sumber : Data primer yang diolah

Berdasarkan tabel 4.5 diatas dapat dijelaskan bahwa jumlah responden yang tidak pernah mengikuti kursus atau diklat di bidang pengelolaan barang milik daerah sebesar 0% artinya tidak ada, jumlah responden yang pernah mengikuti kursus atau diklat di bidang pengelolaan barang milik daerah sebesar 96,875% atau sebanyak 31 orang, dan jumlah responden yang sering mengikuti kursus atau diklat di bidang pengelolaan barang milik daerah sebesar 3,125% atau sebanyak 1 orang. Berdasarkan data yang diperoleh tersebut mayoritas responden pernah mengikuti kursus atau diklat di bidang pengelolaan barang milik daerah.

4.1.2 Hasil Analisis Data

Statistik deskriptif digunakan untuk mengetahui penilaian responden terhadap pernyataan yang berkaitan dengan variabel-variabel penelitian. Statistik deskriptif dilakukan dengan membuat nilai rata-rata pada setiap *item* jawaban, dan untuk melihat penilaian responden digunakan nilai rentang skala sebagai berikut:

Nilai maksimum : 5

Nilai minimum : 1

Rentang skala : $\frac{5-1}{5} = 0,8$

Kategori:

1. 1,0 - 1,80 = sangat rendah/sangat buruk
2. 1,81 - 2,60 = rendah/buruk
3. 2,61 - 3,40 = sedang/cukup
4. 3,41 - 4,20 = tinggi/baik
5. 4,21 - 5,00 = sangat tinggi/sangat baik

Hasil statistik deskriptif dari masing-masing variabel dapat dilihat sebagai berikut:

4.1.2.1 Variabel Perlakuan Akuntansi atas Aktiva Tetap

Dalam variabel ini terdiri dari indikator dengan 10 pernyataan yang diajukan kepada responden. Berikut hasil statistik deskriptif variabel perlakuan akuntansi atas aktiva tetap dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 4.7

Hasil Statistik Deskriptif Variabel Perlakuan Akuntansi atas Aktiva Tetap

Indikator	Frekuensi Jawaban Responden										Rata-rata
	STS		TS		RR		S		SS		
	1	Bobot	2	Bobot	3	Bobot	4	Bobot	5	Bobot	
1. Pengakuan Aset Tetap											
Suatu aset diakui sebagai aset tetap apabila aset tersebut memiliki masa manfaat lebih dari dua belas bulan.	0		0		0		19	76	13	65	4,40625
Maksud pengadaan aset tetap bukan untuk dijual melainkan suatu aset tetap diperoleh dengan maksud untuk digunakan dalam menunjang kegiatan operasional entitas.	0		0				21	84	11	55	4,34375

2. Pengukuran Aset Tetap :										
Suatu aset tetap dinilai telah sesuai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.	0		0	5	15	17	68	10	50	4,15625
3. Penilaian Awal Aset Tetap :										
Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya telah diukur berdasarkan biaya perolehan. Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh.	0		0	6	18	17	68	9	45	4,09375
4. Pengeluaran Setelah Perolehan :										
Pengeluaran untuk perbaikan atau perawatan aset tetap yang memperpanjang masa manfaat dan akan memberi manfaat dalam periode berjalan dan dimasa akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.	0		0	7	21	18	72	7	35	4
5. Penyusutan dan Penilaian Kembali (Revaluasi) Aset Tetap :										
a. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode di BPKA diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dan diinvestasikan dalam aset tetap.	0		0	1	3	15	60	16	80	4,46875
b. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat aset tetap dibukukan dalam ekuitas dana pada akun	0		0	8	24	16	64	8	40	4

Diinvestasikan pada Aset Tetap.											
6. Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap											
Suatu aset yang dianggap sudah tidak lagi memiliki manfaat akan dieliminasi dari neraca dan dihentikan penggunaannya.	0		0		2	6	22	88	8	40	4,1875
7. Pengungkapan Aset Tetap:											
a. Setiap jenis aset seperti tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan mesin dan lain sebagainya dinyatakan dalam neraca secara terpisah atau terperinci dalam catatan atas laporan keuangan.	0		0		1	3	21	84	10	50	4,28125
b. Laporan keuangan BPKA telah mengungkapkan rekonsiliasi jumlah tercatat yang menunjukkan pelepasan dan mutasi aset tetap lainnya selama periode tahun berjalan.	0		0		0		22	88	10	50	4,3125
Total											4,225

Sumber : Data primer yang diolah dan Output SPSS23

Dari hasil output tabel 4.7, hasil pernyataan responden mendapatkan skor rata-rata sebesar 4,225, yang menunjukkan Perlakuan Akuntansi atas Aktiva Tetap sangat baik. Rata-rata tertinggi diperoleh sebesar 4,46875 , artinya bahwa responden sangat setuju atas indikator pernyataan-pernyataan dalam kuesioner tentang variabel perlakuan akuntansi atas aktiva tetap (X).

4.1.2.2 Variabel Kualitas Laporan Keuangan

Dalam variabel ini terdiri dari indikator dengan 6 pernyataan yang diajukan kepada responden. Berikut hasil statistik deskriptif variabel perlakuan akuntansi atas aktiva tetap dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 4.8

Hasil Statistik Deskriptif Variabel Kualitas Laporan Keuangan

Indikator	Frekuensi Jawaban Responden										Rata-rata
	STS		TS		RR		S		SS		
	1	Bobot	2	Bobot	3	Bobot	4	Bobot	5	Bobot	
Dapat Dipahami :											
BPKA telah menyajikan laporan keuangan yang dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang telah disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan.	0		0		0		24	96	8	40	4,25
Relevan :											
BPKA telah menyajikan laporan keuangan dengan memberikan informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini untuk membuat kebijakan masa depan, serta menegaskan hasil evaluasi di masa lalu.	0		0		0		21	84	11	55	4,344
Keandalan :											
a. BPKA telah menyajikan laporan keuangan yang transparan dalam mengolah transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan.	0		0		0		26	104	6	30	4,1875
b. BPKA telah menyajikan laporan keuangan yang dapat diuji sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan.	0		0		0		18	72	14	70	4,4375

c. BPKA telah menyajikan laporan keuangan yang diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan tertentu.	0		0		0		26	104	6	30	4,1875
Dapat Dbandingkan :											
BPKA telah menyajikan laporan keuangan yang dapat dibandingkan sesuai kebijakan akuntansi yang dari tahun ke tahun.							25	100	7	35	4,2187
Total											4,2708

Sumber : Data primer yang diolah dan Output SPSS23

Dari hasil output tabel 4.8, hasil pernyataan responden mendapatkan skor rata-rata sebesar 4,2708, yang menunjukkan Kualitas Laporan keuangan sangat baik. Rata-rata tertinggi diperoleh sebesar 4,4375, artinya bahwa responden sangat setuju atas indikator pernyataan-pernyataan dalam kuesioner tentang variabel kualitas laporan keuangan (Y).

4.1.3 Hasil Uji Validitas

Pengujian validitas digunakan untuk mengukur pernyataan-pernyataan yang ada dalam kuesioner. Suatu koefisien korelasi (r) bernilai positif dan lebih besar dari r tabel, maka dinyatakan bahwa butir pernyataan tersebut valid atau sah. Sebaliknya jika bernilai negatif, atau positif namun lebih kecil dari r tabel, maka butir pernyataan dinyatakan tidak valid.

Penyebaran kuesioner dilakukan kepada 32 orang responden dengan jumlah pernyataan sebanyak 16 *item* pernyataan, dimana seluruh *item* pernyataan dikategorikan valid dengan syarat r hitung lebih besar dari r tabel. Dalam penelitian ini r tabel ditetapkan sebesar 0,3494 (lihat r tabel pada df=30 dengan tingkat signifikansi untuk uji dua arah sebesar 5%) berdasarkan dengan rumus (df=n-2), maka (32-2=30).

Ketentuan untuk pengambilan keputusan :

- Jika r hitung positif dan r hitung $>$ r tabel maka butir pernyataan tersebut valid
- Jika r hitung negatif dan r hitung $<$ r tabel maka butir pernyataan tersebut tidak valid.

Tabel 4.9

Hasil Uji Validitas Variabel Perlakuan Akuntansi atas Aktiva Tetap

No. Item	R-hitung	R-Table	Keterangan
1a	0,461	0,3494	valid
1b	0,561	0,3494	valid
2	0,59	0,3494	valid
3	0,608	0,3494	valid
4	0,567	0,3494	valid
5a	0,583	0,3494	valid
5b	0,491	0,3494	valid
6	0,458	0,3494	valid
7a	0,528	0,3494	valid
7b	0,423	0,3494	valid

(Sumber : Output SPSS Versi 23)

Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan program SPSS 23 yang tersaji pada tabel 4.6, dapat dilihat bahwa seluruh instrumen penelitian yang digunakan memiliki nilai koefisien korelasi (r) $>$ 0,3494 (r tabel) sehingga seluruh instrumen penelitian yang digunakan untuk mengukur variabel perlakuan akuntansi atas aktiva tetap dinyatakan valid.

Tabel 4.10

Hasil Uji Validitas Variabel Kualitas Laporan Keuangan

No. Item	R-hitung	R-Table	Keterangan
8	0,545	0,3494	valid
9	0,488	0,3494	valid
10a	0,779	0,3494	valid
10b	0,445	0,3494	valid
10c	0,512	0,3494	valid
11	0,603	0,3494	valid

(Sumber : *Output SPSS Versi 23*)

Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan program SPSS 23 yang tersaji pada tabel 4.7, dapat dilihat bahwa seluruh instrumen penelitian yang digunakan memiliki nilai koefisien korelasi (r) > 0,3494 (r tabel) sehingga seluruh instrumen penelitian yang digunakan untuk mengukur variabel kualitas laporan keuangan dinyatakan valid.

4.1.4 Hasil Uji Reliabilitas

Pengujian ini digunakan untuk mengukur pernyataan-pernyataan yang ada dalam kuesioner apakah *reliable* atau tidak dengan melihat Koefisien *Cronbach Alpha*. Jika nilai *Cronbach Alpha* > 0,70 variabel dikatakan Reliabel, sebaliknya jika nilai *Cronbach Alpha* < 0,70 variabel dikatakan tidak reliabel. Hasil Uji Reliabilitas dapat dilihat di tabel 4.8 dan tabel 4.9 :

Tabel 4.11

Hasil Uji Reliabilitas Variabel Perlakuan Akuntansi atas Aktiva Tetap (X)

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
,752	10

(Sumber : *Output SPSS Versi 23*)

Berdasarkan tabel 4.8 di atas dapat diketahui bahwa variabel perlakuan akuntansi atas aktiva tetap (X) diperoleh nilai *Cronbach Alpha* sebesar 0,752 > 0,7. Dengan demikian variabel perlakuan akuntansi atas aktiva tetap (X) dinyatakan reliabel.

Tabel 4.12

Hasil Uji Reliabilitas Variabel Kualitas Laporan Keuangan (Y)

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
,771	6

(Sumber : *Output SPSS Versi 23*)

Berdasarkan tabel 4.8 di atas dapat diketahui bahwa variabel kualitas laporan keuangan (Y) diperoleh nilai *Cronbach Alpha* sebesar 0,771 > 0,7. Dengan demikian variabel kualitas laporan keuangan (Y) dinyatakan reliabel.

4.1.5 Hasil Transformasi Data Ordinal menjadi Interval

Sebelum melakukan analisis regresi dilakukan transformasi data dengan mengubah data ordinal menjadi interval, metode transformasi yang digunakan yaitu *Method of Successive Interval* (MSI). Hasil transformasi data ordinal menjadi interval dapat dilihat pada tabel 4.10 :

Tabel 4.13

Hasil Transformasi Data Ordinal menjadi Interval

	X.1	X.2	X.3	X.4	X.5	X.6	X.7	X.8	X.9	X.10	Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	Y.5	Y.6
1	2,608	2,631	3,666	3,635	3,698	4,05	3,542	4,239	4,385	2,648	5,504	2,695	2,631	2,767	2,601	2,767
2	2,608	2,631	2,318	2,307	2,349	2,551	1	1	2,82	1	2,47	1	1	1	1	1
3	1	1	3,666	3,635	2,349	2,551	3,542	4,239	2,82	1	4,087	1	2,631	2,767	2,601	1
4	2,608	2,631	3,666	3,635	3,698	4,05	3,542	2,684	4,385	2,648	4,804	2,695	2,631	2,767	2,601	2,767
5	1	1	2,318	2,307	3,698	4,05	1	2,684	2,82	1	2,848	2,695	2,631	1	2,601	1
6	1	1	1	2,307	2,349	4,05	2,271	4,239	2,82	1	2,848	1	1	1	2,601	1
7	2,608	2,631	3,666	3,635	3,698	4,05	3,542	2,684	4,385	1	4,484	1	1	1	1	1
8	2,608	2,631	2,318	1	1	4,05	2,271	2,684	2,82	2,648	3,373	1	2,631	1	1	1

9	1	1	2,318	1	1	2,551	1	2,684	1	1	1	1	2,631	1	2,601	2,767
10	2,608	1	2,318	1	2,349	2,551	1	2,684	2,82	2,648	2,47	1	1	1	1	1
11	1	1	1	2,307	2,349	2,551	2,271	4,239	2,82	2,648	2,848	1	1	1	2,601	1
12	2,608	1	1	1	2,349	2,551	2,271	1	4,385	1	2,009	1	2,631	1	1	1
13	1	1	1	2,307	2,349	1	1	2,684	2,82	1	1,569	1	1	1	1	1
14	1	1	2,318	2,307	1	2,551	1	2,684	4,385	1	2,009	1	1	1	1	1
15	1	1	3,666	1	2,349	4,05	2,271	2,684	2,82	2,648	3,373	1	1	2,767	2,601	1
16	1	1	1	2,307	2,349	2,551	2,271	2,684	2,82	1	2,009	1	1	1	2,601	1
17	2,608	2,631	2,318	2,307	1	4,05	2,271	2,684	2,82	1	3,373	1	1	1	1	1
18	1	1	3,666	2,307	2,349	2,551	3,542	2,684	2,82	1	3,373	1	1	1	1	1
19	1	2,631	3,666	2,307	2,349	4,05	1	4,239	2,82	1	3,832	1	2,631	1	1	1
20	2,608	2,631	3,666	3,635	3,698	4,05	2,271	4,239	4,385	2,648	4,804	2,695	2,631	2,767	2,601	2,767
21	1	1	2,318	2,307	2,349	2,551	2,271	2,684	2,82	1	2,47	1	1	1	1	1
22	2,608	1	2,318	3,635	2,349	2,551	1	2,684	4,385	1	3,373	2,695	1	1	1	1
23	1	1	2,318	3,635	1	2,551	2,271	2,684	2,82	1	2,47	2,695	1	1	2,601	1
24	1	1	2,318	2,307	2,349	4,05	2,271	2,684	2,82	1	2,848	1	2,631	1	1	1
25	1	1	2,318	1	2,349	4,05	3,542	2,684	4,385	1	3,373	2,695	1	1	1	1
26	2,608	2,631	2,318	2,307	3,698	4,05	2,271	2,684	2,82	1	4,087	2,695	1	1	1	1
27	1	1	2,318	2,307	3,698	2,551	2,271	4,239	2,82	1	3,373	1	1	1	1	1
28	1	2,631	3,666	2,307	1	2,551	2,271	2,684	4,385	1	3,373	1	1	1	1	2,767
29	2,608	1	2,318	2,307	2,349	4,05	3,542	2,684	2,82	2,648	4,087	1	1	1	2,601	1
30	2,608	2,631	2,318	3,635	2,349	4,05	2,271	4,239	4,385	1	4,331	1	2,631	2,767	2,601	1
31	1	1	3,666	2,307	1	4,05	2,271	2,684	2,82	2,648	3,373	1	1	1	2,601	2,767
32	1	1	2,318	3,635	2,349	2,551	3,542	2,684	2,82	2,648	3,832	1	1	1	1	1

Sumber : www.statcal.com

Berdasarkan tabel 4.10 dapat diketahui hasil tranformasi data ordinal menjadi interval, yang digunakan untuk proses analisis regresi dan proses selanjutnya.

4.1.6 Hasil Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah distribusi variabel terikat untuk nilai variabel bebas tertentu berdistribusi normal atau tidak. Dalam model regresi linier, asumsi ini ditunjukkan oleh nilai *error* (e) yang berdistribusi normal. Model regresi yang baik adalah model regresi yang memiliki distribusi normal atau mendekati normal, sehingga layak digunakan untuk pengujian statistik.

Pengujian normalitas data menggunakan *Test of Normality Kolmogorov-Smirnov*. Hasil pengujian adalah sebagai berikut :

Tabel 4.14

Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		32
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	1,47953002
Most Extreme Differences	Absolute	,124
	Positive	,124
	Negative	-,086
Test Statistic		,124
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber : Output SPSS Versi 23

Tabel 4.14 menunjukkan bahwa *Asymp. Sig. (2-tailed)* 0,200 lebih besar dari 0,05 , maka dapat disimpulkan bahwa data residual berdistribusi normal.

4.2 Hasil Penelitian

Penelitian perlakuan Akuntansi atas Aktiva Tetap terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung, akan dianalisis menggunakan analisis regresi linear sederhana, koefisien determinasi, dan uji F. Analisis regresi mensyaratkan data yang digunakan memiliki skala pengukuran minimal interval yang telah ditransformasi dari data ordinal.

4.2.1 Uji Signifikansi simultan (Uji Statistik F)

Uji F bertujuan menunjukkan apakah dalam model regresi semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen, yang diuji pada tingkat signifikan 0,05. Hasil uji F dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 4.15

Hasil Uji Statistik F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	33,641	1	33,641	14,872	,001 ^b
	Residual	67,859	30	2,262		
	Total	101,500	31			

a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan (Y)

b. Predictors: (Constant), Perlakuan Akuntansi atas Aktiva Tetap (X)

Sumber : Output SPSS Versi 23

Tabel 4.16 dalam model ANOVA dapat diperoleh F hitung sebesar 14,872 dengan tingkat signifikan 0,001. Oleh karena tingkat signifikan lebih kecil dari 0,05 maka variabel Perlakuan Akuntansi atas Aktiva Tetap secara simultan atau bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen yaitu Kualitas Laporan Keuangan.

4.2.2 Analisis Regresi Linear Sederhana

Analisis regresi sederhana didasarkan pada hubungan fungsional ataupun kausal satu variabel independen dengan satu variabel dependen. Tujuan analisis regresi adalah untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y).

Hasil uji regresi linear sederhana dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.16

Hasil Uji Regresi Linear Sederhana

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-1,530	1,880		-,814	,422
	Perlakuan Akuntansi atas Aktiva Tetap	,510	,078	,768	6,577	,000

a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan

Sumber : Output SPSS Versi 23

Dari hasil *Output* diatas pada kolom Beta dimasukkan kedalam persamaan :

$$Y = -1,530 + 0,510 X$$

Atau

Kualitas Laporan Keuangan = -1,530 + 0,510 Perlakuan Akuntansi atas Aktiva Tetap

Koefisien regresi Perlakuan Akuntansi atas Aktiva Tetap $X = 0,768$, bernilai positif, artinya semakin baik Perlakuan Akuntansi atas Aktiva akan meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan.

4.2.3 Analisis Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R^2) merupakan nilai yang menunjukkan besarnya distribusi pengaruh yang diberikan oleh efektivitas perlakuan akuntansi atas aktiva tetap terhadap kualitas laporan keuangan yang dinyatakan dalam bentuk persen.

Hasil analisis koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.17

Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,768 ^a	,590	,577	2,06289

a. Predictors: (Constant), Perlakuan Akuntansi atas Aktiva Tetap

b. Divident Variable: Kualitas Laporan Keuangan

Sumber : *Output* SPSS Versi 23

Pada tabel *output* di atas, dapat dilihat nilai R^2 yang diperoleh sebesar 0,590 atau 59%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa perlakuan akuntansi atas aktiva tetap memberikan kontribusi pengaruh R^2 sebesar 59% terhadap kualitas laporan keuangan, sedangkan sebanyak (1-*R square*) 41% sisanya merupakan besar kontribusi pengaruh yang diberikan oleh faktor lain yang tidak diteliti.

4.3 Pembahasan Hasil Penelitian

4.3.1 Perlakuan Akuntansi atas Aktiva Tetap pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung

Tabel 4.7 memberikan informasi mengenai skor tanggapan responden terhadap pernyataan berkaitan dengan perlakuan akuntansi atas aktiva tetap yang dipengaruhi sebagai berikut :

1. Indikator yang memiliki skor rata-rata tertinggi pertama yaitu pernyataan terkait penyusutan aktiva tetap dengan skor rata-rata 4,46875 dapat diartikan bahwa Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung telah melakukan dengan sangat baik terkait dengan perlakuan

atas nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dan diinvestasikan dalam aset tetap.

2. Indikator yang memiliki skor tertinggi kedua yaitu terkait pengakuan aset tetap dengan skor rata-rata 4,40625, dapat diartikan bahwa Badan pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung sudah melakukan pengakuan atas aset tetap dengan sangat baik.
3. Sedangkan untuk indikator yang memiliki skor rata-rata terendah yaitu terkait pengeluaran setelah perolehan aset tetap, dan penilaian kembali (revaluasi) aset tetap dengan skor 4 dapat diartikan bahwa Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung kurang dalam pengelolaan pengeluaran untuk perbaikan atau perawatan aset tetap yang memperpanjang masa manfaat dan akan memberi manfaat dalam periode berjalan dan dimasa akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, serta penilaian kembali (revaluasi) aset tetap.

Hasil dari tanggapan responden menunjukkan beberapa komponen yang masih lemah diantaranya dalam hal pengeluaran setelah perolehan dan penilaian kembali (revaluasi) aset tetap, peneliti menyarankan meningkatkan perlakuan akuntansi atas aktiva tetap dengan melaksanakan indikator akuntansi aset tetap dengan sangat baik, sehingga tidak banyak lagi aset Kota Bandung yang terbengkalai. Apabila komponen indikator yang masih lemah tersebut diperhatikan dan dijalankan dengan baik maka akan berpengaruh baik terhadap kualitas laporan keuangan dalam pengelolaan asetnya, terutama aset tetap.

4.3.2 Kualitas Laporan Keuangan Badan Pengelolaan Keuangand dan Aset Daerah Kota Bandung

Pada variabel kualitas laporan keuangan dengan jumlah 6 *item* pernyataan dan jumlah responden 32 orang, diperoleh total skor rata-rata 4,2708. Maka dapat diketahui bahwa tanggapan responden terhadap kualitas laporan keuangan termasuk dalam kategori sangat baik.

Hal ini mengandung makna bahwa ketika semua indikator dari kualitas laporan keuangan yang terdiri dari indikator dapat dipahami, relevan, keandalan, dan dapat dibandingkan telah dilaksanakan dengan sangat baik maka keempat indikator tersebut dapat mempengaruhi kualitas informasi dari laporan keuangan yang telah dibuat, yang nantinya akan disajikan secara jujur, tidak menyesatkan, dan dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya sehingga dapat mempengaruhi pengambilan keputusan di masa yang akan datang agar lebih baik. Indikator yang memiliki nilai skor rata-rata paling rendah adalah indikator keandalan, oleh karena itu perlu adanya perbaikan dan tindak lanjut yang harus dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung mengenai indikator keandalan agar kulaitas laporan keuangan semakin membaik.

4.3.3 Pengaruh Perlakuan Akuntansi atas Aktiva Tetap secara simultan berpengaruh Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Simultan

Nilai R^2 atau *R square* yang diperoleh adalah sebesar 0,59 atau 59%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa perlakuan akuntansi atas aktiva tetap memberikan kontribusi pengaruh *R square* sebesar 59% terhadap kualitas laporan keuangan, sedangkan sebanyak (1-*R square*) 41% sisanya merupakan besar kontribusi

pengaruh yang diberikan oleh faktor lain yang tidak diteliti. Karena probabilitas jauh lebih kecil dari 0,05 maka model regresi dapat digunakan untuk memprediksi kualitas laporan keuangan atau dapat dikatakan dikatakan bahwa perlakuan akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Dari hasil penelitian uji F dapat diketahui bahwa hasil tersebut disebabkan karena Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai lembaga pemerintahan yang mengelola dana yang diberikan pemerintah untuk dijadikan pelayanan kepada masyarakat harus menjadi lembaga yang berkualitas. Oleh karena itu, salah satunya dibutuhkan kemampuan Kepala Badan sebagai pimpinan tertinggi dan Kepala Bagian sebagai pimpinan yang membantu dengan didukung oleh Staf-Staf Kepegawaian untuk mengelola BPKAD dengan baik. Sehingga perlakuan akuntansi atas aktiva tetap memberikan pengaruh secara simultan terhadap kualitas laporan keuangan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan pengujian hipotesis mengenai perlakuan akuntansi atas aktiva tetap terhadap kualitas laporan keuangan (studi kasus pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung), maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Perlakuan Akuntansi atas Aktiva Tetap pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung dalam tabel hasil statistik deskriptif variabel perlakuan akuntansi atas aktiva tetap yang diperoleh dari tanggapan responden memperoleh skor rata-rata 4,225 yaitu termasuk dalam kategori yang sangat baik. Namun di dalam komponen perlakuan akuntansi atas aktiva tetap yaitu terkait pengeluaran setelah perolehan aset tetap dan penilaian kembali (revaluasi) aset tetap masih menjadi indikator terlemah.
2. Kualitas Laporan Keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung dalam tabel hasil statistik deskriptif variabel kualitas laporan keuangan yang diperoleh dari tanggapan responden memperoleh skor rata-rata 4,2708 yaitu termasuk ke dalam kategori yang sangat baik. Namun di dalam komponen kualitas laporan keuangan yaitu keandalan terkait penyajian laporan keuangan yang transparan dan wajar serta penyajian laporan keuangan yang tidak berpihak kepada pihak tertentu masih menjadi indikator terlemah.

3. Hasil pengujian yang dilakukan secara simultan menunjukkan bahwa perlakuan akuntansi atas aktiva tetap berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung. Nilai koefisien determinasi menunjukkan pengaruh sebesar 59%, sedangkan sisanya 41% dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa perlakuan akuntansi atas aktiva tetap pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung mempunyai pengaruh yang cukup besar atas peningkatan kualitas laporan keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kota Bandung.

5.2 Saran

Pada bagian saran ini, peneliti bermaksud mengajukan saran yang berhubungan dengan penelitian. Adapun saran yang diajukan peneliti adalah sebagai berikut :

1. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa komponen-komponen perlakuan akuntansi atas aktiva atau aset tetap yang masih lemah diantaranya pengeluaran setelah perolehan aset tetap dan penilaian kembali (revaluasi) aset tetap, peneliti menyarankan meningkatkan kinerja perlakuan akuntansi dalam pengelolaan aktiva atau aset tetap dengan melaksanakan indikator perlakuan akuntansi atas aktiva tetap secara baik, selain itu perlu dilakukan pelatihan/pembinaan (diklat) terkait pengeluaran setelah perolehan dan penilaian kembali (revaluasi) atas aset tetap agar sesuai dengan perhitungan standar akuntansi pemerintahan dengan didukung

pengendalian internal yang baik, sehingga perlakuan akuntansi atas aktiva/aset tetap Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kota Bandung berjalan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku.

2. Hasil penelitian ini menunjukkan komponen yang masih lemah terkait laporan keuangan yaitu mengenai keandalan dari laporan keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung. Peneliti menyarankan dilakukannya pendidikan dan pelatihan (diklat) untuk para staf di bagian akuntansi dan pencatatan dan pelaporan aset atau keuangan agar terus mampu mengasah keahlian dalam mengelola aset tetap dan mengungkapkannya dalam laporan keuangan berkualitas baik, untuk memperoleh opini Audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan hasil Wajar Tanpa Pengecualian.
3. Peneliti menyarankan bagi peneliti selanjutnya yang juga akan mengambil penelitian serupa, untuk menambah variabel-variabel lain yang menghasilkan pengaruh lebih besar terhadap kualitas laporan keuangan. Kualitas laporan keuangan dapat dipengaruhi beberapa variabel lain seperti pengendalian internal, sistem akuntansi keuangan daerah, dan variabel lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Erlina., Rambe, O.S. & Rasdianto. (2015), *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis AkruaI*, Medan: Brama Ardian.
- Ghozali, I. (2016), *Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS 23*, Universitas Diponegoro.
- Halim, A. (2008), *Auditing (Dasar-dasar Audit Laporan Keuangan)*, Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan STIM YKPN.
- <http://www.bpka.bandung.go.id/profile-bpka/tentang-bpka>, diunduh pada tanggal 25 Oktober 2018.
- <http://www.bpka.bandung.go.id/profile-bpka/struktur-organisasi>, diunduh pada tanggal 25 Oktober 2018.
- <http://www.bpka.bandung.go.id/profile-bpka/visi-misi>, diunduh pada tanggal 25 Oktober 2018.
- <http://www.statcal.com/DOWNLOADSTATCAL.html>, diunduh tanggal 14 Januari 2019.
- [http://www.spsstatistik.com/cara-membaca-dan-mencari-r-tabel-product moment/](http://www.spsstatistik.com/cara-membaca-dan-mencari-r-tabel-product-moment/), diunduh tanggal 7 Januari 2019.
- https://www.youtube.com/results?search_query=tutorial+uji+reliabilitas+spss, diunduh tanggal 6 Januari 2019.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2015), *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 01 : Penyajian Laporan Keuangan*, Jakarta: IAI.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2011), *Aset Tetap*, Jakarta: IAI.
- Kasmir. (2016), *Analisis Laporan Keuangan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kieso, D.E., Weygant, J.J. & Warfield, T. D. (2012), *Financial Accounting : IFRS Edition*, United States of Amerika: Wiley.
- Kurniawan, I. S. (2016), Determinan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, *Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, Vol.13, hlm. 47-58.
- Lam, N. & Lau, P. (2014), *Akuntansi Keuangan Perspektif IFRS*, ed.2, Jakarta: Salemba Empat.

- Mulyadi. (2016), *Sistem Akuntansi*, Jakarta Selatan: Salemba Empat.
- Martono, N. (2014), *Metode Penelitian Kuantitatif: Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder*, Depok: Rajagrafindo Persada.
- Pedoman Penyusunan dan Penulisan Skripsi STIE Ekuitas*, Tahun Akademik 2018/2019, Bandung: STIE Ekuitas.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
- Prarisma, Y.N.S. & Dewi, S.W. (2017), Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Terhadap Laporan Keuangan Berdasarkan SAK ETAP, *Jurnal PETA*, Vol.2, hlm. 51-75.
- Santoso, S. (2016), *Panduan Lengkap SPSS Versi 23*, Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Sugiyono. (2017), *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*, Bandung: Alfabeta.
- Suharli, M. (2006), *Akuntansi Untuk Bisnis Jasa dan Dagang*, ed.1, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sumarsan, T. (2013), *Perpajakan Indonesia*, Jakarta:Indeks.
- Sunyoto, D. (2016), *Metodologi Penelitian Akuntansi*, Bandung: Refika Aditama.
- Tanjung, A. H. (2014), *Akuntansi, Transparansi, dan Akuntabilitas Keuangan Publik*, Yogyakarta:BPFE Universitas Gajah Mada.
- Tipan, A., Saerang, D. P. E. & Lambey, R. (2015), Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Pada Dinas Pekerjaan Umum (PU) Povinsi Sulawesi Utara, hlm. 57-65.
- Warren D. C. & dkk. (2013), *Pengantar Akuntansi*, Buku I, Jakarta: Salemba Empat.
- Wijaya, T. Y. W., Endang, R. A. & Retnasari, A. (2014), Analisis Perlakuan Akuntansi Atas Aset Tetap Terhadap Laporan Keuangan Berdasarkan SAK ETAP NO 15, *Jurnal Riset Mahasiswa*.

